

**DETERMINAN KEGAGALAN AUSTRALIA DALAM DIPLOMASI TARIF  
PERDAGANGAN BEBAS DENGAN AMERIKA SERIKAT (2022-2025)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**SABIYA FAADHILAH ARUMDAPTA**

22323001

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

**DETERMINAN KEGAGALAN AUSTRALIA DALAM DIPLOMASI TARIF  
PERDAGANGAN BEBAS DENGAN AMERIKA SERIKAT (2022-2025)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**SABIYA FAADHILAH ARUMDAPTA**

22323001

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DETERMINAN KEGAGALAN AUSTRALIA DALAM DIPLOMASI TARIF  
PERDAGANGAN BEBAS DENGAN AMERIKA SERIKAT (2022-2025)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

24 Februari 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Program Studi

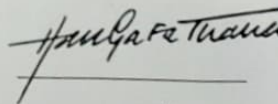


Karolina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

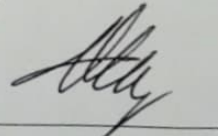
Dewan Penguji

Tanda Tangan

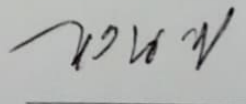
1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.



2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.



3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

12 Februari 2026,



Sabiya Faadhilah Arumdapta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	<b>8</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	<b>11</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	<b>14</b>
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	<b>15</b>
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>15</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>15</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	<b>16</b>
<b>BAB 2 Hubungan Bilateral Australia dan Amerika Serikat</b>	<b>17</b>
<b>2.1. Ekonomi</b>	<b>17</b>
<b>2.2. Militer</b>	<b>24</b>
<b>2.3. Politik</b>	<b>30</b>
<b>BAB 3 Aplikasi Interdependensi Asimetris dalam Diplomasi Tarif Perdagangan Bebas dengan AS</b>	<b>35</b>
<b>3.1. Independensi Militer</b>	<b>36</b>
<b>3.2. Kerentanan Nonmiliter</b>	<b>41</b>
<b>3.3. Sensitivitas Nonmiliter</b>	<b>45</b>
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	<b>48</b>
<b>4.1. Kesimpulan</b>	<b>48</b>
<b>4.2 Rekomendasi</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Interdependensi Asimetris	12
Tabel 2. AUKUS dan ANZUS	25
Tabel 3. Anggaran pertahanan Australia dan AS	36
Tabel 4. Ekspor Australia ke AS 2022-2025	43
Tabel 5. Ekspor Australia ke Cina 2022-2025	43

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Defisit Perdagangan Australia-AS 2022	18
Diagram 2. Defisit Perdagangan Australia-AS 2023	18
Diagram 3. Defisit Perdagangan Australia-AS 2024	19
Diagram 4. Neraca Perdagangan Australia-AS 2025	19

## ABSTRAK

Sejak 12 Maret 2025, Australia dikenakan tarif oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 25% pada baja dan aluminium. Sebelum tarif diberlakukan oleh AS, Australia telah tergabung dalam ANZUS, AUSFTA, dan AUKUS. Australia secara konsisten mengandalkan hubungan bilateralnya dengan AS. Namun, Australia sempat gagal memperoleh pengecualian tarif. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji determinan kegagalan Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS pada 2022-2025. Rumusan masalah berupa, mengapa Australia gagal melakukan diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS?. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran *asymmetrical interdependence* dari Keohane dan Nye. *Asymmetrical interdependence* merupakan konsep yang menyoroti dua pihak yang saling membutuhkan tetapi satu pihak mengalami ketergantungan yang lebih besar, maka pihak tersebut cenderung memiliki daya tawar yang lebih lemah. Dalam konsep *asymmetrical interdependence* terdapat 3 sumber independensi berupa militer, kerentanan non militer, dan sensitivitas non militer. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, temuan sementara menunjukkan bahwa Australia sempat gagal dalam diplomasi tarif perdagangan bebas AS karena Australia belum memiliki independensi militer, kerentanan nonmiliter, dan sensitivitas non militer.

**Kata-kata kunci:** Australia, Amerika Serikat, Tarif, *Asymmetrical interdependence*.

## ABSTRACT

Since March 12, 2025, Australia has been subject to a 25% tariff on steel and aluminum by the United States (US). Before the tariffs were imposed by the US, Australia had joined ANZUS, AUSFTA, and AUKUS. Australia has consistently relied on its bilateral relationship with the US. However, Australia failed to obtain tariff exemptions. Therefore, this study examines the determinants of Australia's failure in free trade tariff diplomacy with the US in 2022-2025. The problem formulation is, why did Australia fail to conduct free trade tariff diplomacy with the US? This study uses the asymmetrical interdependence framework from Keohane and Nye. Asymmetrical interdependence is a concept that highlights two parties that need each other but one party experiences greater dependence, so that party tends to have weaker bargaining power. In the concept of asymmetrical interdependence, there are three sources of independence: military, non-military vulnerability, and non-military sensitivity. Based on this framework, the preliminary findings indicate that Australia failed in its free trade tariff diplomacy with the US because it lacked military independence, non-military vulnerability, and non-military sensitivity.

**Keywords:** Australia, United States, Tariff, Asymmetrical interdependence.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Australia adalah salah satu mitra dagang Amerika Serikat (AS) bahkan Australia dan AS memiliki perjanjian berupa AUSFTA (Australia-United States Free Trade Agreement) yang telah berlaku sejak 1 Januari 2005. (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade 2024). Pada tahun fiskal 2024-2025 AS tercatat sebagai mitra dagang Australia dalam urutan ketiga terbesar. AS berada di peringkat ketiga setelah Cina di peringkat pertama dan Jepang di peringkat kedua (Australian Bureau of Statistics 2025b). AUSFTA dinilai sebagai perjanjian buruk yang merugikan Australia dan hanya menguntungkan AS. Australia dirugikan dalam sistem kekayaan intelektual, investasi, dan kesehatan. Hanya AS yang diuntungkan dalam ketiga aspek tersebut. Ada perkiraan dari salah satu ekonom Australia bernama Tim Harcourt bahwa AUSFTA adalah cara John Howard menunjukkan solidaritas dengan pemerintahan George W. Bush setelah serangan 11 September. Dapat dinilai aneh karena lebih terkait dengan geopolitik dan pertahanan dibandingkan perdagangan. Beberapa ekonom berargumen bahwa di dalam AUSFTA banyak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada AS (Verrender 2025). Dapat diamati dari opini yang diunggah oleh Jack Thrower yang juga seorang ekonom, bahwa Australia memang dirugikan sepihak dalam AUSFTA. Perjanjian AUSFTA ini membuat Australia seperti mengancam hak kekayaan intelektual, kehilangan

kemampuan untuk mengatur investasi asing, dan mengancam industri farmasi Australia (Thrower 2025).

Selain AUSFTA, Australia telah memiliki kontribusi penting dalam ANZUS yang merupakan sebuah aliansi militer antara Australia, Selandia Baru, dan AS. ANZUS merupakan perjanjian militer yang telah berlaku sejak 29 April 1952 (Parliamentary Education Office 2023). Terlebih lagi, keikutsertaan Canberra dalam Perang Dunia II menandai pergeseran kesetiaan Australia dari berpihak ke Kerajaan Inggris menjadi berpihak ke AS (Dell’Era dan Martin 2024). Tetapi ANZUS tetap menempatkan Australia dalam posisi strategis yang sangat bergantung pada keamanan dan pertahanan yang disediakan oleh AS. Selain tergabung dalam AUSFTA dan ANZUS, Australia juga tergabung dalam AUKUS sejak September 2021. AUKUS merupakan kemitraan keamanan antara Australia, Inggris, dan AS. AUKUS memiliki inisiatif pertama untuk mendukung Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Inisiatif tersebut ada untuk mencapai tujuan ketiga negara dalam AUKUS yang bekerja sama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh dunia termasuk di Indo-Pasifik (Albanese dkk. 2023).

Sejak 12 Maret 2025 AS menerapkan kebijakan tarif sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium AS. Donald Trump menyatakan bahwa Australia membunuh pasar aluminium (Stuart dan Clarke 2025). Meskipun, pada 11 Februari 2025, Anthony Albanese telah mengupayakan pengecualian tarif melalui percakapan telepon yang berdurasi 40 menit dengan Donald Trump sebelum tarif tersebut diberlakukan. Anthony Albanese telah menyampaikan argumen Australia untuk memperoleh pengecualian tarif AS dalam percakapan telepon tersebut. Setelah itu,

Anthony Albanese dan Donald Trump sepakat menyampaikan ke publik mengenai Presiden AS setuju mempertimbangkan pengecualian tarif demi kepentingan kedua negara (Staszewska 2025). Namun, kebijakan tarif diterapkan oleh AS dan mempengaruhi sektor ekonomi di Australia. Para produsen logam dan penambang di Australia diperkirakan akan terdampak oleh tarif yang diterapkan. Setelah menerima kenyataan bahwa Australia gagal menghindari tarif AS, Australia tidak melakukan kebijakan proteksionis seperti tarif balasan. Namun, Australia mengupayakan agar mendapatkan pengecualian tarif dari AS (Ticha 2025). Australia sadar bahwa menanggapi tarif AS dengan tarif balasan hanya akan memperkeruh suasana sudah tegang. Menuntun pada persaingan tarif yang ketat dan meningkatkan kerugian. Serta dapat semakin menyulitkan pekerja, bisnis, industri, dan ekonomi Australia (Muroi dan Wright 2025). Tarif AS menyadarkan betapa ketergantungannya Australia pada impor. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa tatanan ekonomi global telah bergeser. Pergeseran tatanan ekonomi tersebut mendorong potensial Australia untuk berpindah ke Cina (Pham 2025).

Setelah tarif diterapkan Australia sempat menegosiasikan pengecualian tarif dan berakhir tetap dikenakan tarif pada 5 April 2025. Penolakan tersebut berakhir dengan Australia dikenakan tarif *baseline* pada 5 April untuk impor ke AS sebesar 10%. Australia menjadi salah satu negara yang memperoleh tarif *baseline* (The Independent 2025). Penolakan setelah proses negosiasi membuktikan Australia gagal memenuhi target perlindungan ekonomi yang diharapkan. Berbeda dengan Australia, para mitra dagang terbesar Australia memperoleh tarif yang lebih tinggi. Maka dari itu Australia mengkhawatirkan akan ada penurunan permintaan ekspor bijih besi, batu

bara, dan gas. Australia menanggapi tarif AS dengan tidak menerapkan tarif timbal balik kepada AS dan rencana menemukan pasar lain. Pasar baru ini termasuk Cina, Jepang, dan Korea Selatan (Deane 2025). Dapat diamati bahwa Australia lolos dari tarif *reciprocal*. Apabila mengamati sekutu lainnya yang mendapatkan tarif *reciprocal* dengan persentasi yang besar. Tarif *baseline* yang salah satunya diterapkan pada Australia. Namun, tarif *baseline* dinilai tidak berlogika dan bertentangan dengan dasar kemitraan antara Australia dan AS. Australia bahkan sempat berencana menggunakan mekanisme resolusi sengketa yang tercantum dalam AUSFTA (Australia-United States Free Trade Agreement). Memang tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini akan mendorong biaya hidup masuk menjadi isu dalam Pemilu Australia di tahun 2025 (Watson dan Tian 2025). Namun tarif tinggi tetap dapat dikenakan apabila produksi dilakukan di negara dengan pengenaan tarif AS dengan persentase yang besar. Maka apabila ada pengusaha Australia dengan manufaktur berlokasi di Cina. Walaupun hanya sebagian yang diproduksi di Cina maka terkena tarif besar yang telah diterapkan kepada Cina oleh AS (ABC News 2025).

Sebelum tarif diberlakukan, Australia telah tergabung dalam aliansi dengan AS seperti ANZUS, AUSFTA, dan AUKUS. Australia secara konsisten mengandalkan hubungan bilateralnya dengan AS yang seringkali berakhir mengesampingkan kepentingan domestik demi menjaga hubungan strategis dengan AS (Wilkins 2019). Di tengah kebijakan ekonomi AS yang semakin proteksionis dan berorientasi pada kepentingan domestik, Australia sulit memperoleh perlakuan istimewa dalam negosiasi tarif. Upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Australia untuk mendapatkan pengecualian dari tarif AS tidak membuahkan hasil

yang signifikan. Pemerintah AS menempatkan kepentingan ekonomi nasional di atas hubungan aliansi strategis, menggunakan tarif sebagai alat tekanan dalam negosiasi perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Australia. Meskipun Australia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan AS sebagai mitra ekonomi hingga memiliki perjanjian AUSFTA, tetapi kenyataannya dalam hubungan perdagangan menunjukkan bahwa kedekatan tersebut tidak otomatis memberikan perlindungan ekonomi (Ranald 2025). Hubungan aliansi yang erat antara Australia dan AS belum tentu mampu melindungi kepentingan perdagangan di tengah meningkatnya kebijakan proteksionis saat ini. Pendekatan diplomasi di era Anthony Albanese yang mengutamakan penghindaran konfrontasi dan eskalasi konflik dagang dengan tidak memberikan tarif balasan (Doherty dan Butler 2025). Pada Februari 2025, PM Anthony Albanese menjawab pernyataan Presiden Donald Trump yang akan menerapkan tarif sebesar 20%, dengan menyatakan bahwa kesepakatan ANZUS sangat kokoh dan AS akan membela Australia jika diperlukan (Lyons 2025). Namun AS tetap mengenakan tarif sepihak yang melanggar komitmen di dalam AUSFTA (Ranald 2025).

Adapun ketergantungan Australia terhadap AS membentuk pola Australia cenderung memandang berbagai isu perdagangan dengan AS sebagai masalah sekunder yang dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, ketika AS mengisyaratkan tidak ada negara manapun terlepas dari seberapa dekat hubungannya dengan AS akan diberikan pengecualian. PM Anthony Albanese menyatakan bahwa keputusan AS tersebut tidak dapat dibenarkan dan dianggap bertentangan dengan semangat persahabatan antara Australia dengan AS yang juga telah memberikan manfaat dalam

kemitraan ekonomi antar kedua negara selama lebih dari 70 tahun (Prime Minister of Australia 2025b). Pada Maret 2025, PM Anthony Albanese sempat menawarkan jaminan pasokan mineral penting ke AS dalam proses menegosiasikan pengecualian tarif. Akan tetapi, tawaran jaminan pasokan mineral penting tersebut ditolak oleh AS. Menteri Sumber Daya Alam Australia Madeleine King, menyatakan meskipun tawaran tersebut ditolak AS, Australia tidak akan menawarkan tawaran yang lebih menguntungkan untuk mineral-mineral penting (Belot 2025). Setelah itu Australia sempat bernegosiasi kembali tetapi AS meminta pelonggaran untuk beberapa Undang-Undang Australia. AS secara terbuka meminta para mitra dagangnya untuk memberikan tawaran yang menguntungkan AS ketika Australia berusaha menegosiasikan pengecualian tarif. Australia memiliki UU biosekuriti, regulasi sektor farmasi dan UU yang mewajibkan raksasa media sosial membayar berita. Ketiganya regulasi tersebut dikecam AS karena AS menilai UU biosekuriti menghalangi produk AS untuk masuk ke Australia. Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese berjanji bahwa tidak akan ada UU yang akan tersentuh atau dilemahkan hanya semata-mata untuk menghindari tarif. Australia memustikan untuk tidak menegosiasikan ketiga regulasi hanya untuk memperoleh pengecualian tarif AS. Australia mempertimbangkan bahwa diperkirakan dampak tidak langsung tarif AS itu sangat rendah untuk ekonomi Australia. Dengan demikian dampak tidak langsung tarif AS tidak sepadan dengan melemahkan Undang-Undang yang menyokong negara (Evans 2025). Setelah itu tarif diturunkan menjadi 10% sejak 9 April 2025. Akan tetapi, tidak lama setelahnya mulai 29 Agustus 2025, AS menanggukkan pengecualian de minimus untuk impor yang bernilai rendah ke AS (Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade 2025a). Dengan demikian, dari seluruh proses negosiasi sebagai upaya diplomasi tarif perdagangan bebas Australia dengan AS, Australia tetap berakhir tidak memperoleh pengecualian tarif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis determinan kegagalan Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa Australia gagal melakukan diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan Australia melakukan diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS di era Anthony Albanese 2022-2025.
2. Untuk menjelaskan pengaruh aliansi keamanan dan ekonomi antara Australia dan AS terhadap diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS di era Anthony Albanese 2022-2025.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Cakupan penelitian adalah dari tahun 2022 sampai Desember 2025 yang merupakan periode Anthony Albanese menjabat sebagai Perdana Menteri Australia.

Pada periode tersebut, ada penerapan tarif AS ke Australia, setelah AS memberlakukan kembali tarif Bagian 232 pada semua impor baja dan meningkatkan tarif aluminium dari 10% menjadi 25% kepada para mitra dagangnya tanpa terkecuali sejak 12 Maret 2025. Kemudian, Australia adalah salah satu negara dengan perjanjian perdagangan bebas dengan AS, Australia tetap berakhir menerima tarif sebesar 10% mulai 5 April 2025 (UN Trade and Development 2025). Mulai 1 Agustus 2025, tarif sebesar 50% dikenakan pada impor baja dan aluminium Australia ke AS, beberapa produk tembaga dan produk yang mengandung tembaga. Lebih lanjut ada mobil, truk ringan, dan suku cadang otomotif tertentu dikenakan tarif sebesar 25%. Mulai 14 Oktober 2025, tarif 25% dikenakan pada produk kayu berlapis kain tertentu, lemari dapur, dan meja rias, serta tarif 10% mulai dikenakan pada kayu lunak dan kayu olahan (Austrade 2026b).

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Sejak 12 Maret 2025, semua pengecualian sebelumnya untuk tarif Section 232 dari *Trade Expansion Act 1962* diakhiri dan tarif tambahan sebesar 25% diterapkan pada produk baja dan aluminium. Selain Section 232, ada Section 301 dari *Trade Act of 1974* yang digunakan untuk menargetkan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh AS, seperti kekayaan intelektual di Cina. Tarif AS ini berdampak mengganggu rantai pasokan di beberapa sektor industri seperti, semikonduktor, otomotif, dan farmasi. Oleh karena itu disarankan untuk para mitra dagang AS, contohnya dengan melakukan diversifikasi rantai pasokan dengan mencari sumber

pasokan alternatif dan memastikan identifikasi negara asal yang jelas untuk menghindari tarif yang tinggi (Chandra dkk. 2025).

Kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump pada masa jabatan yang kedua ini sering disebut “Trump 2.0”. Pendekatan kebijakan luar negeri ini mengedepankan nasionalisme ekonomi dan unilateralisme, yang mana Presiden Donald Trump cenderung menantang kesepakatan dagang yang ada dan mengancam mengenakan tarif kepada sekutu terdekat AS. Kebijakan luar negeri tersebut merupakan kebijakan perlindungan ekonomi yang menggunakan retorika keras yang menyalahkan pihak asing atas kerugian domestik AS, kemudian mendorong sistem ekonomi tertutup yang memicu resistensi dari para mitra dagang AS. Akibatnya sekutu-sekutu utama seperti Australia, Kanada, Jerman, Inggris, dan Jepang memandang AS dengan kurang positif karena kebijakan yang lebih mementingkan AS sendiri ini. Lebih lanjut, dalam konteks hubungan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik, kebijakan AS yang tidak dapat diprediksi menciptakan keraguan di antara mitra dagangnya. Akibatnya, Australia yang merupakan salah satu mitra dagang AS terdorong mencari kemitraan regional baru demi melindungi kepentingan nasionalnya (Nisar dan Rahim 2025).

Kebijakan tarif AS di tahun 2025 ini memulai fenomena “Perang Tarif” yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika ekonomi global. Kebijakan ini menerapkan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari berbagai mitra dagang AS yang bertujuan melindungi industri domestik tetapi secara bersamaan telah memicu ketegangan perdagangan internasional. Apabila mengamati hasil analisis yang menggunakan model GTAP-FIN untuk skenario adanya balasan tarif dari negara

mitra dagang AS kecuali Australia, pada skenario tersebut Australia terkena dampak lebih kecil dengan mendapatkan peningkatan investasi sebesar 1,5%. Sebaliknya, jika Australia memberikan balasan tarif ke AS, Australia mengalami peningkatan *terms of trade* sebesar 1,4% yang berkontribusi dalam peningkatan konsumsi riil dan GDP nasional. Berdasarkan kedua hasil simulasi kedua skenario tersebut, dampak kebijakan tarif AS cenderung positif terhadap ekonomi Australia jika dibandingkan dengan negara lain yang sangat terdampak oleh tarif AS (Syawaludin dan Sari 2025).

Kesimpulan dari tinjauan pustaka berikut adalah secara keseluruhan ketiga jurnal yang membahas tarif AS di tahun 2025 ini belum secara jelas menganalisis dan memaparkan dampak tarif AS terhadap Australia. Adapun jurnal pertama berjudul, "Impact of U.S. Tariffs on International Trade: Legal Perspectives and Global Implications" (Chandra dkk. 2025), hanya memaparkan dampak tarif AS secara global. Jurnal kedua berjudul, "From Make America Great Again to Make America Alone: Understanding Trump 2.0 World's Mathematics" (Nisar dan Rahim 2025), telah memaparkan dampak tarif AS terhadap para mitra dagang AS termasuk Australia. Jurnal ketiga berjudul, "Dampak Kebijakan Tarif AS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Global Pada 2025" (Syawaludin dan Sari 2025), jurnal ini memaparkan analisis dari hasil simulasi beberapa skenario termasuk ketika Australia tidak memberi tarif balasan dan memberi tarif balasan ke AS. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan fokus penelitian sebelumnya lebih cenderung ke dampak tarif AS secara global dan masih terlalu sempit terkait hubungan tarif AS dengan Australia. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti determinan kegagalan Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas di era Anthony Albanese.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan konsep *Asymmetrical interdependence* (interdependensi asimetris) dari Keohane dan Nye dalam rangka menganalisis penyebab Australia gagal melakukan diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS. Interdependensi asimetris dari Keohane dan Nye adalah konsep yang menyoroti situasi diantara dua aktor yang memiliki ketergantungan timbal balik yang tidak seimbang, sehingga aktor yang kurang bergantung memiliki sumber kekuatan untuk memengaruhi hasil karena biaya yang mereka tanggung mengubah hubungan tersebut lebih rendah dibandingkan mitranya (Keohane dan Nye 2012).

Interdependensi asimetris dapat terjadi dalam berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, keamanan, teknologi, atau sosial. Ketergantungan dalam interdependensi asimetris mengacu pada kebutuhan satu aktor terhadap barang, jasa, sumber daya, atau dukungan aktor lain. Ketergantungan dalam interdependensi asimetris melibatkan sensitivitas dan kerentanan. Namun, perlu dibedakan antara sensitivitas (seberapa cepat aktor merasakan dampak perubahan) dan kerentanan (seberapa jauh aktor dapat mengatasi perubahan) karena seringkali sensitivitas sebuah negara tidak sama dengan kerentanannya. Kerentanan lebih menentukan posisi politik dan kekuasaan dalam hubungan (Keohane dan Nye 2012).

Selain itu, interdependensi asimetris menjadi dasar untuk memahami hubungan kekuasaan dalam sistem internasional dan hubungan politik-ekonomi. Interdependensi asimetris dapat menjadi sumber kekuasaan bagi pihak yang memiliki ketergantungan lebih rendah untuk menggunakan posisinya dalam mempengaruhi

pihak yang lebih bergantung. Situasi tersebut dapat diterjemahkan sebagai proses tawar menawar yang kompleks karena potensi kekuasaan yang tidak seimbang. Interdependensi asimetris memiliki 3 sumber utama interdependensi, sebagai berikut:

**Tabel 1. Interdependensi Asimetris**

Sumber Independensi	Peringkat Dominasi	Peringkat Biaya	Implementasi Kontemporer
Militer (biaya penggunaan kekuatan militer)	1	1	Diimplementasikan dalam situasi ekstrem atau ketika berhadapan dengan musuh lemah dengan kemungkinan biaya rendah.
Kerentanan non militer (biaya kebijakan alternatif)	2	2	Diimplementasikan ketika kendala normatif rendah dan aturan internasional tidak dianggap mengikat (termasuk hubungan nonmiliter antara musuh, dan situasi konflik yang sangat tinggi antara mitra dekat dan sekutu).
Sensitivitas non militer (biaya perubahan dalam kebijakan yang ada)	3	3	Diimplementasikan ketika sumber kekuasaan jangka pendek atau ketika kendala normatif tinggi dan aturan internasional mengikat. Terbatas, karena jika biaya tinggi dikenakan maka aktor yang dirugikan dapat merumuskan kebijakan baru.

**Sumber:** (Keohane dan Nye 2012)

Tabel peringkat interdependensi asimetris tersebut menjelaskan hierarki sumber daya kekuasaan ini berdasarkan dominansi (efektivitas) dan biaya penggunaannya.

1. Militer menempati peringkat tertinggi namun termahal, hanya digunakan pada kondisi ekstrem atau ketika menghadapi negara yang sangat lemah karena biaya untuk penggunaan kekuatan militer sangat besar dan berisiko tinggi.

2. Kerentanan (vulnerability) nonmiliter di peringkat kedua dalam peringkat dominasi dan biaya, cenderung dimanfaatkan ketika batasan moral atau aturan internasional lemah sehingga aktor bisa memilih jalur kebijakan alternatif lain meskipun memerlukan biaya politik atau ekonomi tertentu.
3. sensitivitas (sensitivity) nonmiliter di peringkat terendah dengan biaya paling murah karena kekuasaan yang dihasilkan seringkali bersifat jangka dan hanya efektif ketika adanya perubahan kebijakan sulit dilakukan karena aturan atau norma yang mengikat tetapi jika aktor yang dirugikan menanggung biaya besar, maka aktor tersebut cenderung segera menyesuaikan atau mengubah kebijakan agar efek ketergantungan melemah dengan cepat.

Dalam konteks ini, karena penggunaan kekuatan yang lebih dominan selalu berbanding lurus dengan biaya yang lebih besar, Keohane dan Nye memiliki premis bahwa para aktor cenderung hanya menggunakan sumber daya di peringkat yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya kepentingan yang dipertaruhkan. Premis tersebut berkesinambungan dengan ketiga indikator sumber independensi yang multi level berdasarkan peringkat biaya dan dominasi. Maknanya, semakin meningkat kepentingan akan semakin meningkat pula sumber daya independensi yang digunakan untuk memperolehnya (Keohane dan Nye 2012).

Oleh karena itu pengaitan indikator dari interdependensi asimetris Keohane dan Nye sangat relevan dalam menganalisis kegagalan Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS. Konsep ini memungkinkan pemahaman bagaimana berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, keamanan, teknologi, atau sosial memengaruhi keputusan ekonomi, sehingga kegagalan tidak hanya disebabkan

faktor ekonomi semata. Konsep interdependensi asimetris tersebut digunakan penelitian ini mengkaji kegagalan diplomasi tarif Australia-AS dengan mengaplikasikan tiga sumber independensi dari interdependensi asimetris sebagai yang indikator multi level. Indikator multi level tersebut berurutan dari yang peringkat tertinggi hingga terendah yaitu militer, kerentanan nonmiliter, dan sensitivitas nonmiliter. Ketiga indikator ini dianalisis dengan data yang mendukung setiap indikator.

### **1.7 Argumen Sementara**

Berdasarkan kerangka pemikiran Keohane dan Nye, kegagalan Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas AS disebabkan oleh ketergantungan militer dan kerentanan nonmiliter yang dialami Australia sebagai sekutu AS. Dapat diamati bahwa aliansi-aliansi antara Australia dan AS menyebabkan adanya ketergantungan militer bagi Australia. Ketergantungan militer sudah mulai ada sejak ANZUS, AUKUS dan semakin menonjol ketika Donald Trump menerapkan tarif ke Australia. Ketergantungan muncul karena Australia lebih memerlukan sekutunya AS, dibandingkan sebaliknya. Dalam ANZUS, Australia mendapatkan jaminan keamanan dari AS tetapi Australia harus konsisten berpartisipasi dalam konflik yang dipimpin AS. Dalam AUKUS, Australia dapat bantuan memperkuat keamanan di kawasan indo-pasifik tetapi di saat yang sama juga meningkatkan ketergantungan teknologi ke AS. Australia memiliki kerentanan nonmiliter ketika lebih banyak menerima kerugian dalam perjanjian AUSFTA dengan AS dan sensitivitas non militer yaitu strategi diplomasi tarif yang kurang sesuai.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif cenderung menonjolkan perspektif subjek, proses, dan makna dari penelitian dengan dipayungi oleh berbagai teori dan atau pendukung sehingga sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (Fiantika dkk. 2022).

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian ini adalah Australia. Objek penelitian ini adalah determinan kegagalan Australia melakukan diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Data - data tersebut bersumber dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen resmi ada dua jenis sebagai dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal dapat berupa memo dan aturan suatu lembaga masyarakat. Dokumen eksternal misalnya majalah dan beragam berita di media massa (Fiantika dkk. 2022).

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai pedoman dalam menganalisis rumusan masalah dari topik penelitian yang akan dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa tahap:

1. Melihat hasil laporan terkait penelitian dan membaca berbagai bahan sesuai dengan penelitian.

2. Melakukan pengumpulan data dari sumber sekunder.
3. Menganalisis data yang telah dikumpulkan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian.

### **Bab II**

Berisi pemaparan sejarah aliansi Australia dan AS termasuk ANZUS, AUSFTA, dan AUKUS serta pengaruhnya terhadap diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS.

### **Bab III**

Berupa analisis faktor kegagalan diplomasi tarif perdagangan bebas Australian dengan AS dengan menggunakan kerangka pemikiran konsep interdependensi asimetris dari Keohane dan Nye.

### **Bab IV**

Berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi strategis untuk penguatan posisi negosiasi dengan menyeimbangkan keamanan dan ekonomi.

## **BAB 2**

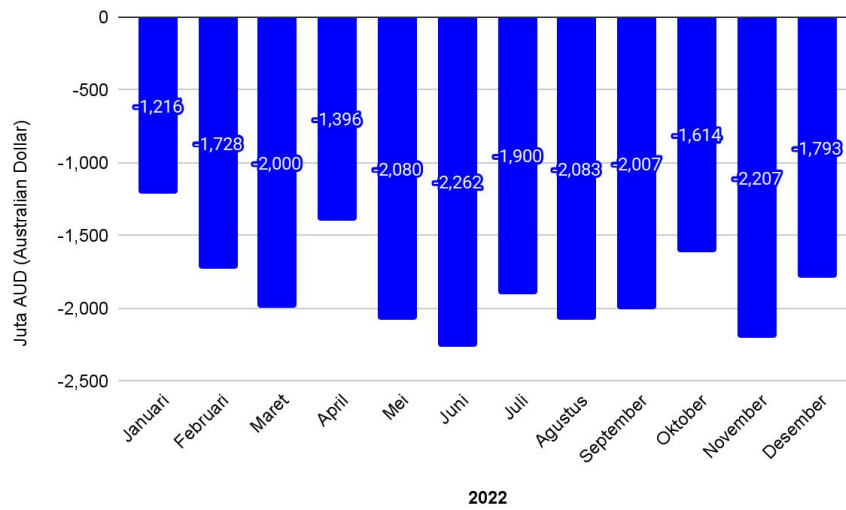
### **Hubungan Bilateral Australia dan Amerika Serikat**

Bab ini, memaparkan hubungan bilateral Australia dan AS dengan dibagi menjadi tiga bidang yaitu ekonomi, militer, dan politik. Alasan dibagi menjadi ketiga bidang tersebut karena hubungan kedua negara tersebut bersifat multidimensional. Australia dan AS dalam bidang ekonomi merupakan mitra dagang dan memiliki perjanjian perdagangan bebas seperti AUSFTA. Pada bidang militer kedua negara bergabung dalam aliansi keamanan seperti ANZUS dan AUKUS. Pada bidang politik Australia-AS memiliki pertemuan diplomasi rutin berupa AUSMIN.

#### **2.1. Ekonomi**

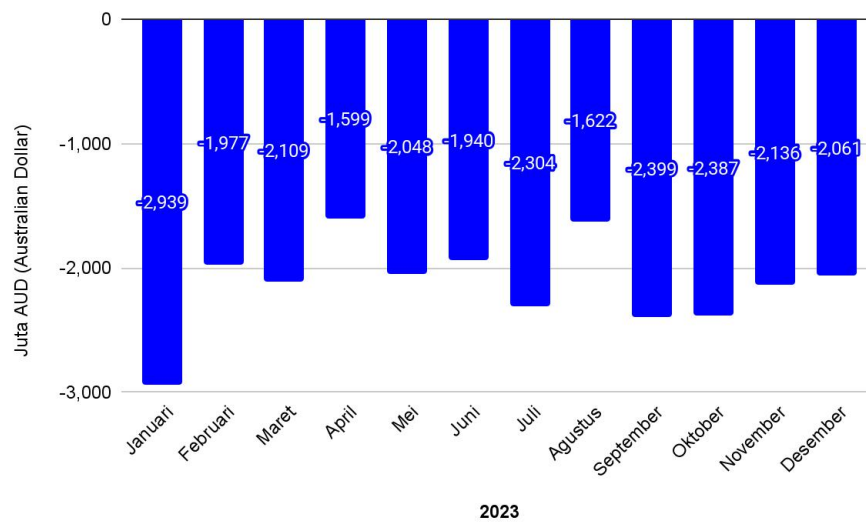
Australia dan AS telah menjalin hubungan erat melalui Australia United States Free Trade Agreement (AUSFTA) yang mulai berlaku sejak tahun 2005. AUSFTA memperlancar akses pasar kedua negara dengan memangkas tarif dan hambatan non tarif. Sejak berlakunya AUSFTA, nilai perdagangan bilateral dan investasi meningkat secara signifikan yang menjadikan AS sebagai salah satu mitra dagang dan investor terbesar Australia. Namun, berdasarkan data neraca perdagangan sejak Januari 2022-April 2025 dari *Australian Bureau of Statistics*, data tersebut menunjukkan Australia menderita defisit panjang dari Januari 2022-Desember 2024. Mulai Januari 2025-Maret 2025, Australia mengalami surplus, tetapi kembali mengalami defisit di bulan April 2025 (*Australian Bureau of Statistics 2025a*). Dapat diamati ekspor dan impor Australia-AS dalam data perdagangan 2022-2025, sebagai berikut:

**Diagram 1. Defisit Perdagangan Australia-AS 2022**



**Sumber:** (Australian Bureau of Statistics 2025a)

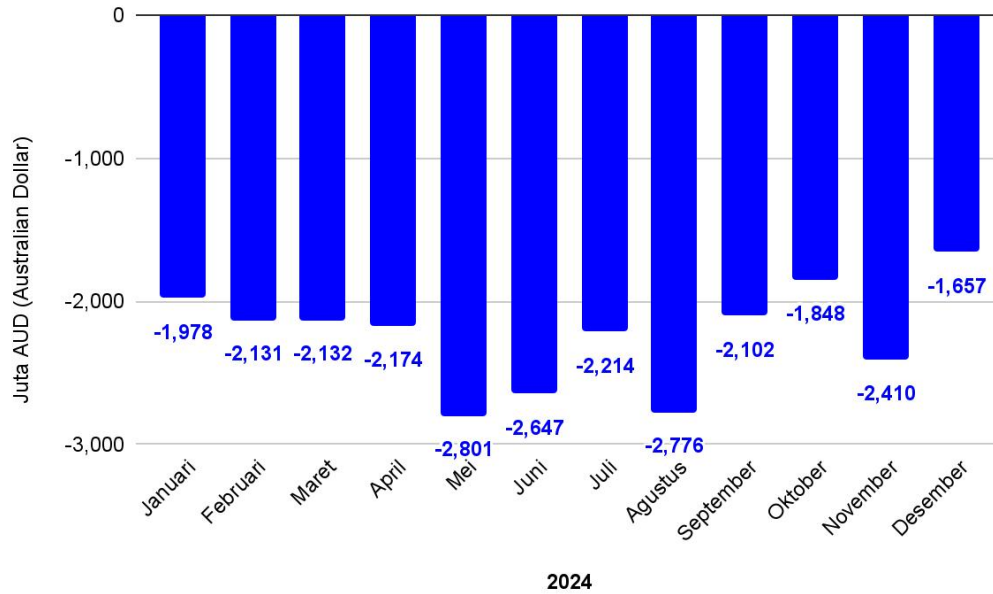
**Diagram 2. Defisit Perdagangan Australia-AS 2023**



**Sumber:** (Australian Bureau of Statistics 2025a)

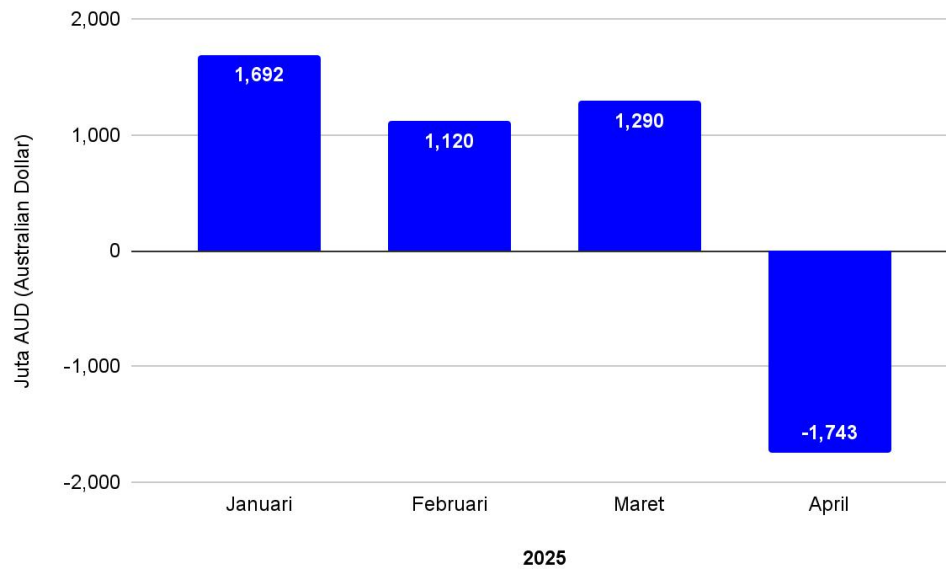
**Diagram 3. Defisit Perdagangan Australia-AS**

**2024**



**Sumber:** (Australian Bureau of Statistics 2025a)

**Diagram 4. Neraca Perdagangan Australia-AS 2025**



**Sumber:** (Australian Bureau of Statistics 2025a)

Berdasarkan diagram 1, data neraca perdagangan 2022 menunjukkan Akumulasi defisit neraca perdagangan Australia selama dua belas periode ini mencapai angka yang cukup besar, yakni sebesar -\$22,28 miliar Australian Dollar (AUD). Fluktuasi angka yang bergerak dari titik terendah sebesar -1,216 AUD pada bulan Januari, kemudian pada bulan Juni melonjak ke angka -2,262 AUD. Berdasarkan diagram 2, data neraca perdagangan 2023 menunjukkan defisit sebesar -\$25,52 miliar Australian Dollar (AUD). Australia mengalami tekanan defisit perdagangan yang konsisten, dengan nilai fluktuasi yang cukup signifikan di setiap periodenya. Pada bulan Januari, defisit terdalam tercatat mencapai -2,939 juta AUD, Meskipun sempat membaik pada bulan April, hingga mencapai level -1,599 juta AUD, angka tersebut tetap tidak mampu keluar dari zona negatif.

Berdasarkan diagram 3, data 2024 menunjukkan defisit agregat sekitar -\$26,9 miliar Australian Dollar (AUD) dengan jumlah impor \$50,6 miliar AUD dan ekspor \$23,8 miliar AUD. Nilai tersebut menunjukkan bahwa impor lebih besar dibandingkan ekspor. Dapat diamati dari data bulanan 2024 bahwa rata-rata defisit adalah sebesar -2,200 juta AUD. Berdasarkan diagram 4, awal tahun 2025 menunjukkan surplus bulanan pertama Januari-Maret total +4.102 juta AUD, dengan Januari +1.692, Februari +1.120, dan Maret +1.290 juta AUD. Kenaikan ini karena ekspor emas non-moneter melampaui puncak Krisis Keuangan Global 2008 sekitar +500 juta AUD dan COVID-2020 sebesar +1.348 juta AUD pada bulan April. Tanpa adanya emas neraca perdagangan mengalami defisit yang sangat besar, Januari -2.925 juta AUD, menegaskan emas sebagai "penyelamat" untuk sementara waktu. April

2025 mengalami defisit -1,743 juta AUD dibandingkan -1,850 tanpa emas, menandakan pemulihan ekspor emas (Australian Bureau of Statistics 2025a).

Hubungan perdagangan dan investasi antara Australia dan AS berkontribusi penting pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan dampak hingga membuka lapangan kerja baru di Australia. Ekspor Australia ke AS hanya mencapai sekitar 5 persen dari total ekspor nasional dan memberikan kontribusi hanya sebesar 0,9 persen terhadap PDB pada tahun 2024 saat Australia mengalami defisit agregat sebesar -\$26,9 miliar Australian Dollar (AUD). Perdagangan kedua negara di awal 2025 menunjukkan dinamika yang cukup tinggi, termasuk surplus sementara yang disebabkan oleh peningkatan ekspor emas non-moneter. Hal ini menunjukkan bahwa Australia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar global. Namun, tantangan jangka panjang yang dihadapi Australia adalah mengurangi ketergantungan ekspor untuk sektor bahan mentah dengan memperkuat sektor manufaktur serta jasa berteknologi tinggi agar daya saing di pasar global meningkat (Australian Bureau of Statistics 2025a).

Pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump yang pertama (2017-2021), hubungan ekonomi Australia-AS menghadapi dinamika baru yang cukup menantang. Pada tahun 2018, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mencapai kesepakatan agar Australia dikecualikan dari tarif baja dan aluminium yang diberlakukan AS. Kesepakatan ini adalah hasil dari lobi kuat dari pemerintah Australia yang melibatkan pejabat senior dan tokoh-tokoh penting, termasuk diplomat dan tokoh bisnis yang dekat dengan Donald Trump. Selain itu, Donald Trump menyatakan bahwa Australia bekerja sangat cepat pada kesepakatan

keamanan sehingga tidak perlu menerapkan tarif pada sekutu utama seperti Australia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa diplomasi Australia efektif dalam menghadapi tekanan kebijakan perdagangan proteksionis AS di bawah pemerintahan Donald Trump yang pertama. Kesepakatan pengecualian tarif ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan dalam hubungan bilateral Australia (Norman 2018).

Pada masa pemerintahan Presiden Joseph R. Biden, Jr. (2021-2025), Australia sudah memiliki AUSFTA yang merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan AS sejak 2005, tetapi memerlukan perjanjian perdagangan bebas regional yang dipimpin oleh AS untuk memperkuat akses pasar serta norma perdagangan demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indo-Pasifik dan demokrasi liberal. Joe Biden mengusulkan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang menekankan pada pasokan, energi bersih, dan pencegahan korupsi tanpa melibatkan pasar sebagai alternatif Trans Pacific Partnership (TPP) yang telah ditarik oleh Donald Trump. Keterbukaan Joe Biden terhadap "*friendshoring*" memberikan harapan optimis kepada sekutu AS. Pada masa Joe Biden, Australia dianggap sebagai “sumber produksi domestik”, berarti perusahaan Australia dapat akses subsidi AS untuk sektor utama seperti mineral penting (Channer 2024). Sebaliknya ketika kampanye presiden AS 2024, Donald Trump mengusulkan menerapkan tarif global 10% dan melipatgandakan tarif untuk Cina hingga sebesar 60% (Aratani 2024). Akan tetapi, Australia menjaga kepentingan untuk menjaga hubungan positif dengan memanfaatkan mineral penting untuk energi bersih untuk menarik investasi dan kerja sama dengan AS (Channer 2024).

Pada tahun 2025, Setelah gagal dapat pengecualian tarif 25% untuk ekspor baja dan aluminium, PM Australia Anthony Albanese sempat merasa pesimis dapat lolos dari tarif balasan Donald Trump. PM Australia Anthony Albanese mengkritik kebijakan tarif ini karena dianggap akan merugikan kepentingan ekonomi kedua belah pihak sendiri. Anthony Albanese sadar bahwa meskipun AS surplus dagang dengan Australia, Donald Trump akan tetap keras pada agenda “America First”. Namun, Anthony Albanese menolak untuk melakukan balasan tarif tetapi Anthony Albanese mengisyaratkan konsekuensi ke Washington berupa bagaimana Warga Australia akan memandang hubungan Australia dengan AS. (Jervis-Bardy dan Butler 2025).

Hubungan ekonomi antara Australia dan AS, seperti perjanjian perdagangan bebas bilateral AUSFTA memberikan preferensi akses pasar yang menunjukkan keeratan kedua negara dalam perjanjian. Meskipun, AS sedang menjauh akses pasar dan perdagangan bebas, tetapi masih ada metode lain bagi Australia dan AS seperti melalui peraturan, kebijakan, dan investasi preferensial (Barret 2025). Namun, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, berupa ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif proteksionis yang diterapkan oleh AS tahun 2025. Akan tetapi, profil ekspor Australia yang beragam memastikan PDB Australia menjadi kurang bergantung pada ekspor AS (Australian Government Export Finance Australia 2025).

Pada 20 Oktober 2025 Australia dan AS menandatangani “*US-Australia Framework for Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths*”. Kerangka kerja tersebut akan menyediakan rantai pasokan yang aman untuk mineral penting dan *rare earths* bagi AS yang berasal dari Australia

(Department of Industry Science and Resources 2025). Perusahaan mineral penting Australia mendapatkan dampak positif dari kerangka kerja tersebut. Dampak positif ini adalah harga saham meroket, seperti saham di *Arafura Rare Earth project* yang naik hingga lebih dari 150% dalam sebulan. Sektor pertambangan di Australia menunjukkan bahwa kerangka kerja antara AS-Australia tersebut menjadi kemajuan penting untuk masa depan ekonomi dan strategis AS-Australia (Barrett 2025).

## **2.2. Militer**

Hubungan militer Australia dan AS dapat diamati melalui aliansi strategis ANZUS dan AUKUS. Berbeda dengan ANZUS yang bersifat sebagai perjanjian keamanan tradisional (Walters dkk. 2021), AUKUS dirancang khusus untuk memfasilitasi modernisasi militer dan penguasaan teknologi pertahanan yang lebih kompleks (Department of the Prime Minister and Cabinet of Australia 2022). Maka dari itu, tabel 2 dibawah ini merangkum perbedaan esensial antara ANZUS dan AUKUS guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pergeseran peran dan fokus dalam kerja sama pertahanan Australia.

**Tabel 2. AUKUS dan ANZUS**

Hubungan Bilateral	Bentuk	Kerja Sama
ANZUS	Perjanjian Keamanan	Berdasarkan ANZUS, Australia dan AS menerapkan sejumlah aktivitas terkait keamanan, termasuk <i>Australia-US Ministerial Consultations</i> (AUSMIN), berbagi intelijen & teknologi, program pertukaran militer, dan latihan militer internasional. Selain itu, Australia mengembangkan hubungan regionalnya dengan Selandia Baru, seperti misi penjaga perdamaian di Timor Leste dan Kepulauan Solomon (National Museum of Australia 2024).
AUKUS	Aliansi ( <i>Pillar 1</i> )	Upaya trilateral antara Australia, Inggris, dan AS untuk mendukung Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir yang bersenjata konvensional (Edel 2023).
AUKUS	Aliansi ( <i>Pillar 2</i> )	Kerja sama dalam dua upaya yang saling terkait termasuk <i>submarines</i> dan kapabilitas canggih (kapabilitas siber, AI ( <i>Artificial Intelligence</i> ) teknologi kuantum, kapabilitas bawah laut tambahan, <i>hypersonic</i> , <i>counter-hypersonic</i> , <i>electronic warfare</i> , inovasi, dan berbagi informasi) (Department of the Prime Minister and Cabinet of Australia 2022).

**Sumber:** (National Museum of Australia 2024; Edel 2023; Department of the Prime Minister and Cabinet of Australia 2022)

Hubungan militer bilateral antara Australia dan AS merupakan fondasi utama dari keamanan nasional Australia dan kemitraan strategis yang telah terjalin sejak akhir Perang Dunia II. Salah satu instrumen paling penting dalam hubungan ini adalah Australia, New Zealand, United States Security Treaty (ANZUS) yang ditandatangani pada tahun 1951 dan mulai berlaku pada tahun 1952. ANZUS memperkuat posisi Australia dengan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan memastikan akses Indonesia terhadap kehadiran militer dan intelijen AS (Walters dkk. 2021).

Namun, ANZUS adalah tonggak awal yang menandai hubungan formal keamanan antara Australia dan AS. Ditandatangani pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco, ANZUS muncul dalam konteks Perang Dingin saat ancaman komunisme dan ketidakpastian stabilitas keamanan di Asia-Pasifik sangat nyata. Australia memperjuangkan kesepakatan ini guna mendapatkan komitmen AS sebagai kekuatan besar yang dapat melindungi kawasan dari potensi ancaman, terutama dari Jepang pasca-Perang Dunia II dan berkembangnya pengaruh Soviet. Aliansi ini lebih dari sekadar kesepakatan militer. ANZUS merupakan simbol kesetiaan strategis dan pembentukan hubungan bilateral jangka panjang yang didasarkan pada nilai bersama seperti demokrasi dan keamanan kolektif (The United States Studies Centre 2025).

Sejak awal, ANZUS membentuk dasar bagi pertukaran intelijen, latihan militer bersama, dan kehadiran militer yang kuat di wilayah Indo-Pasifik. Meski ada dinamika yang mempengaruhi peran Selandia Baru dalam aliansi, khususnya karena kebijakan anti-nuklir, Australia tetap menjadi mitra utama AS dalam kawasan. ANZUS juga mengalami evolusi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Namun, cakupannya meluas meliputi kerja sama dalam bidang siber, ruang angkasa, teknologi baru, serta isu-isu non-tradisional seperti perubahan iklim dan rantai pasok strategis. Aliansi ini terus beradaptasi dengan tantangan geopolitik modern, menegaskan relevansinya sebagai pilar utama keamanan Australia dan kepentingan strategis AS di kawasan tersebut (Walters dkk. 2021).

Melengkapi ANZUS, Australia turut memainkan peran penting dalam pembentukan aliansi keamanan berupa AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) yang diumumkan pada tahun 2021. Australia mendapatkan akses kepada

teknologi militer canggih, khususnya pengembangan kapal selam tenaga nuklir, yang sangat memperkuat kemampuan pertahanan Australia. AUKUS merepresentasikan langkah strategis Australia untuk memperkuat kemandirian pertahanannya sekaligus memperkuat kemitraan dengan dua negara besar Barat. Keuntungan Australia dari AUKUS mencakup peningkatan kapasitas pertahanan dan peran geopolitik yang lebih besar di Indo-Pasifik. Namun, kerugian yang dihadapi adalah dampak diplomatik terhadap hubungan dengan negara-negara tetangga, khususnya Cina, serta biaya besar yang harus dikeluarkan oleh Australia dalam modernisasi militer ini (Fallon 2022).

Selama dua periode kepemimpinan Presiden Donald Trump I (2017-2021) dan II (2025-sekarang), hubungan militer Australia-AS mengalami dinamika yang signifikan. Pada periode pertama Donald Trump pada tahun 2017, ada agenda kerja sama keamanan, berupa Rotasi dari *Marine Rotational Force* di Darwin. Kemudian, ada Kerja Sama Pesawat yang ditingkatkan mulai Februari 2017 dengan mendatangkan satu kuadron F-22 Raptor di *Royal Australian Air Force Base Tindal*. Selanjutnya, ada seorang jenderal Australia menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Pasifik di Hawaii. Ada pula, latihan militer gabungan dan terpadu Talisman Saber 2017 yang melibatkan lebih dari 30.000 pasukan Australia dan AS (United States Department of State 2017). Pada periode kedua, Donald Trump secara resmi mendukung AUKUS saat pertemuan Gedung Putih dengan PM Anthony Albanese pada 20 Oktober 2025. Selama pertemuan di Gedung Putih, kedua pemimpin membahas peran AUKUS untuk mencegah potensi agresi Cina di Indo-Pasifik dan mengumumkan rencana untuk berinvestasi pada berbagai

bahan penting untuk aset pertahanan yang ada dan yang sedang dikembangkan (Vincent 2025).

Selama periode pemerintahan Presiden Joseph R. Biden, Jr. (2021-2025), AUKUS secara resmi diumumkan kembali bertepatan dengan masa pemerintahan PM Australia Scott Morrison. Tepatnya pada 5 April 2022, PM Australia Scott Morrison, PM Inggris Boris Johnson, dan Presiden AS Joe Biden meninjau kemajuan implementasi kemitraan AUKUS, dengan menegaskan kembali komitmen yang kuat untuk Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas serta sistem internasional yang berlandaskan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan penyelesaian sengketa secara damai tanpa paksaan. Komitmen yang menjadi semakin penting setelah invasi Rusia yang tidak berdasar dan ilegal ke Ukraina. Pelaksanaan AUKUS telah dimulai dengan dua inisiatif yang saling berhubungan:

1. *Submarines*. Pengadaan kapal selam berteknologi nuklir yang dilengkapi senjata konvensional untuk Australia secepatnya dengan tetap menjaga standar nonproliferasi yang ketat.
2. *Advanced capabilities*. Pengembangan bersama kemampuan militer canggih untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik (Department of the Prime Minister and Cabinet of Australia 2022).

Sejak AUKUS diluncurkan pada 15 September 2021, ketiga negara telah mengadakan beberapa pertemuan tingkat tinggi:

- 1) *Senior Officials Group*. Pada 10 Maret 2022, Penasihat Keamanan Nasional dari ketiga sekutu mengadakan rapat daring untuk menilai kemajuan AUKUS dan memberikan petunjuk untuk kemitraan trilateral di masa yang akan datang.

- 2) *Joint Steering Groups*. Ketiga negara telah mengadakan beberapa pertemuan Dewan Pengarah Gabungan untuk masing-masing dari dua jalur inisiatif AUKUS, termasuk sesi langsung di Canberra, London, dan Washington, DC.
- 3) *Working Groups*. Tujuh belas kelompok kerja trilateral telah dibentuk (sembilan terkait kapal selam bertenaga nuklir bersenjata konvensional dan delapan mengenai kemampuan militer canggih lainnya masing-masing telah mengadakan beberapa pertemuan (Department of the Prime Minister and Cabinet of Australia 2022)).

AUKUS hadir sebagai respons terhadap perubahan geostrategi yang tajam, terutama peningkatan pengaruh Cina. Pakta ini tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan Australia melalui transfer teknologi dan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir, tetapi juga memperdalam kerja sama riset dan pengembangan teknologi pertahanan canggih seperti kuantum, kecerdasan buatan, dan siber (Dell’Era dan Martin 2024).

Ketika AUKUS diumumkan pada September 2021, PM Scott Morrison, PM Boris Johnson, dan Presiden Joe Biden setuju untuk menentukan cara terbaik untuk kapasitas kapal selam berbahan bakar nuklir Australia yang dipersenjatai secara konvensional paling lambat Maret 2023. Mitra AUKUS telah membuat kemajuan signifikan dalam empat kapabilitas canggih yang ditetapkan oleh Presiden dan Perdana Menteri (PM) dan memulai inisiatif di empat sektor tambahan. Secara keseluruhan, kapabilitas canggih termasuk kapabilitas siber, AI (*Artificial Intelligence*) teknologi kuantum, kapabilitas bawah laut tambahan, *hypersonic*,

*counter-hypersonic, electronic warfare, inovasi, dan berbagi informasi* (The White House 2022).

Pada 29 Oktober 2025, Australia sukses dalam memperoleh kemampuan mandiri dalam mengoperasikan dan merawat kapal selam bertenaga nuklir bersenjata konvensional dari HMAS Stirling. Australia bersama dengan mitra AUKUS bertugas mengatur, mendukung, dan menjalankan paket pekerjaan pemeliharaan penting pada United States Ship (USS) Vermont (SSN 792). Kapal selam kelas Virginia milik AS yang tiba di HMAS Stirling hari ini untuk Submarine Maintenance Period (SMP). USS Vermont memiliki 13 anggota Angkatan Laut Kerajaan Australia dari total keseluruhan 134 awak. Mereka datang dari kelompok perwira dan pelaut yang telah mendapatkan pelatihan mendalam di AS. SMP tahun 2025 ini melibatkan paket pekerjaan yang lebih besar dan kompleks yang lebih mencerminkan jenis pemeliharaan yang diperlukan saat Submarine Rotational Force – West beroperasi di HMAS Stirling pada 2027 (Australian Government Department of Defence 2025).

### **2.3. Politik**

Hubungan politik antara Australia dan AS adalah hubungan bilateral yang melingkupi kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan, intelijen, pembangunan, energi, iklim, lingkungan, pendidikan, hukum, perdagangan, dan investasi. Pada 8 Januari 1940, Australia dan AS mulai menjalin hubungan diplomatik dan disusul pembentukan masing-masing Perwakilan Australia dan AS pada Maret dan Juli 1940. Australia dan AS memiliki *Australia-United States Ministerial Consultations* (AUSMIN) yang diadakan secara berkala antara Sekretaris dan Menteri luar negeri

dan pertahanan (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade 2025b). Hubungan antara Australia dan AS di bidang politik merupakan fondasi penting yang mendukung posisi Australia sebagai negara berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Dilihat dari perspektif Australia, kerja sama ini memberikan banyak manfaat, seperti dukungan dalam hal diplomasi dan kebijakan politik yang memperkuat kredibilitas dan pengaruh Australia di tingkat internasional. Australia melihat kedekatan dengan AS sebagai strategi penting untuk mendapatkan dana, teknologi, dan pengaruh politik yang memudahkan Canberra dalam menyusun kebijakan luar negeri serta menjaga posisi sebagai kekuatan utama di kawasan (Feigenbaum 2025).

Namun, selama masa kepemimpinan Presiden Donald Trump pada periode pertama (2017-2021), hubungan politik antara AS dan Australia mengalami tekanan serta ketidakpastian. Kebijakan luar negeri "America First" yang dianut Trump membuat Australia dan negara-negara sekutu lainnya merasa waspada mengenai komitmen AS terhadap aliansi tradisionalnya. Masa pemerintahan Trump (2017-2021) merupakan masa yang menantang bagi hubungan politik bilateral Australia-AS. Australia menghadapi masalah politik karena kebijakan perdagangan proteksionis Trump serta ucapan kerasnya membuat sulit berdiskusi dan bekerja sama dalam isu-isu bersama. Sikap Australia yang tetap terbuka untuk bekerja sama dalam isu pertahanan dan keamanan tetap menjadi hal positif di tengah adanya ketegangan politik (Kim 2025).

Ketegangan politik antara kedua negara juga tercermin dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana kebijakan proteksionis Trump, khususnya berupa tarif

impor yang tinggi, memberikan dampak langsung pada sektor perdagangan Australia dengan AS. Kebijakan tarif ini mendorong Australia untuk melakukan berbagai penyesuaian dan mempererat hubungan perdagangan dengan negara lain sebagai langkah mitigasi risiko ekonomi. Di samping itu, masalah seperti penanganan perubahan iklim dan kebijakan pengungsi juga menjadi penyebab perbedaan pandangan yang tajam antara kedua negara, mendorong pemerintah Australia untuk menunjukkan kematangan politik dalam mempertahankan dan menyeimbangkan hubungan bilateral yang rumit ini. Lebih lanjut, dapat diamati di masa pemerintahan PM Australia Malcolm Turnbull, Australia berhasil dikecualikan dari tarif setelah lobi kuat yang dilakukan oleh Malcolm Turnbull (Norman 2018).

Ketika masa pemerintahan Presiden Joseph R. Biden, Jr. (2021-2025), pada pertemuan, 20 Mei 2023 Australia-AS membuat pernyataan bersama antara PM Anthony Albanese dan Presiden Joe Biden yang menegaskan kerja sama lebih dari seratus tahun yang berlandaskan pada nilai demokrasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia untuk Indo-Pasifik. Pada pertemuan tersebut, salah satu komitmen Australia-AS adalah menegakkan tatanan global berdasarkan hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan integritas wilayah. Komitmen itu untuk menjamin perdamaian dan kemakmuran masa depan. Australia-AS memiliki komitmen lain seperti berkomitmen pada World Trade Organization (WTO) dan nilai-nilai bersama yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, Australia-AS juga perlu berkomitmen melakukan persaingan yang adil, keterbukaan, transparansi, dan supremasi hukum untuk mendorong perdagangan bebas dan adil, dan memperkuat ketahanan ekonomi (The White House 2023).

Pada masa kepemimpinan Trump yang kedua (2025-sekarang), hubungan politik antara Australia dan AS mengalami perubahan yang cukup besar. Australia mengambil pendekatan yang realistis dengan menerima ketidakpastian kebijakan dari pemerintah AS, sekaligus tetap fokus memperkuat kerja sama strategis, terutama di bidang keamanan regional dan teknologi. Kerja sama dalam kerangka AUKUS, pengadaan mineral kritis untuk keperluan perang teknologi tinggi, serta upaya diplomasi ekonomi menunjukkan komitmen Canberra dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hubungan dengan mitra besar. Namun, Australia juga menghadapi tekanan terkait kemungkinan perubahan kebijakan luar negeri AS yang bisa memengaruhi kebijakan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Australia terus berusaha memperluas hubungan internasional tanpa mengorbankan aliansi utama dengan AS (U. S. Embassy 2022).

Duta besar Canberra di Washington, Kevin Rudd pernah menyatakan bahwa hubungan aliansi Australia dan AS adalah “landasan” kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia. Sejak Akhir Perang Dunia II, Australia tidak hanya bergantung pada supremasi kekuatan AS untuk keamanan dan pertahanan, tetapi juga pada dukungan AS terhadap tatanan ekonomi dan kelembagaan liberal global. Namun, terpilihnya kembali Donald Trump, tampaknya kini “landasan” tersebut goyah yang salah satunya, karena pemerintahannya secara terbuka berpihak pada Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Nilai dan kepentingan AS mungkin sudah tidak lagi selaran dengan nilai dan kepentingan Australia. Meskipun begitu, pengalaman Australia dalam Perang Dunia II menanamkan dalam pemikiran strategis Australia sebuah asumsi bahwa keamanan dapat terancam langsung karena gangguan jarak jauh

terhadap keseimbangan kekuatan global. Namun, kini Australia dan AS menghadapi situasi di mana setiap elemen landasan aliansi Australia dan AS terancam oleh tindakan dan retorika pemerintahan Donald Trump (Clarke 2025).

Secara umum, Australia melihat hubungan politik bilateral dengan AS sebagai kerja sama strategis yang penting untuk mempertahankan keamanan, stabilitas politik, dan pengaruh internasionalnya. Meskipun ada banyak tantangan selama dua masa kepemimpinan Presiden Trump, Australia terus berusaha beradaptasi dengan perubahan kebijakan AS dan menjaga aliansi strategis yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Pemerintah Canberra menganggap hubungan ini sebagai salah satu dasar utama kebijakan luar negerinya, sekaligus tetap memperhatikan pengembangan hubungan dengan negara lain untuk menjaga kedaulatan negara serta menghadapi perubahan politik global di masa depan (Feigenbaum 2025).

## BAB 3

### **Aplikasi Interdependensi Asimetris dalam Diplomasi Tarif Perdagangan Bebas dengan AS**

Bab ini, akan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan Australia melakukan diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS di era Anthony Albanese 2022-2025 dengan mengaplikasikan konsep *asymmetrical interdependence* (interdependensi asimetris) dari Keohane dan Nye (Keohane dan Nye 2012). Berdasarkan kerangka pemikiran Keohane dan Nye tersebut terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan Australia melakukan diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS. Indikator tersebut adalah (1) interdependensi militer; (2) kerentanan nonmiliter; dan (3) sensitivitas nonmiliter. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, analisis akan dilakukan terhadap peran dan posisi Australia dalam menghadapi tekanan dan dinamika kebijakan tarif dari AS. Berdasarkan tabel 1 terdapat sejumlah variabel, sebagai berikut:

- A. Dominasi adalah ketika sumber independensi dengan dominasi yang lebih tinggi menjadi lebih efektif karena berkaitan dengan elemen strategis yang lebih luas seperti kemampuan untuk mengubah regulasi atau mengancam pertahanan.
- B. Biaya merupakan inti ketergantungan dalam interdependensi asimetris, ketika interaksi antar aktor atau negara menimbulkan konsekuensi dalam bentuk ekonomi, politik, sosial atau militer.

Dengan demikian, aktor atau negara perlu menanggung biaya yang relevan, termasuk biaya ekonomi, politik, sosial maupun militer. Merujuk pada tabel 1, peringkat dominasi berbanding lurus dengan biaya, maknanya semakin tinggi tingkat dominasi akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sumber independensi dengan biaya tertinggi adalah dimensi militer, diikuti oleh kerentanan non-militer, dan yang paling rendah adalah sensitivitas non-militer (Keohane dan Nye 2012).

### 3.1. Independensi Militer

Keohane dan Nye menjelaskan bahwa independensi atau kemandirian di bidang militer menempati peringkat dominasi sekaligus biaya yang paling tinggi. Oleh karena itu instrumen militer cenderung digunakan dalam situasi yang sungguh ekstrem, atau ketika menghadapi negara yang sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kekuatan militer yang sangat besar dan berisiko tinggi (Keohane dan Nye 2012). Apabila diaplikasikan teori tersebut, dapat diamati terlebih dahulu faktor-faktor yang mendukung kemandirian militer, sebagai berikut:

**Tabel 3. Anggaran pertahanan Australia dan AS**

Tahun	Australia	AS
2022	32445.33 juta USD	860692.20 juta USD
2023	32387.99 juta USD	916014.70 juta USD
2024	33819.57 juta USD	997309.00 juta USD
2025	37,3 miliar USD	921.0 miliar USD

**Sumber:** (SIPRI 2025; IISS 2026)

Berdasarkan data tabel 3, Australia mengeluarkan jumlah anggaran lebih rendah dari AS untuk pertahanan dari tahun 2022-2025. Di sisi lain, Australia dan AS memiliki aliansi keamanan seperti ANZUS dan AUKUS. Pada tahun 2025, Australia mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar 37.3 miliar USD, sedangkan AS mengeluarkan 921.0 miliar USD. Perbedaan anggaran pertahanan ini mempengaruhi pengadaan aset pertahanan, yang berarti Australia memiliki aset pertahanan di tingkat yang berbeda dari AS. Akibatnya, Australia belum memiliki pertahanan sekuat AS jika mengamati dari biaya yang dikeluarkan.

ANZUS memberikan Australia jaminan keamanan seperti yang ada pada Pasal III dan Pasal IV dalam perjanjian ANZUS yang disepakati pada 1 September 1951. Sebagaimana dikutip dari (Parliament of Australia 1997), dalam ANZUS Pasal III, “Para Pihak akan berkonsultasi bersama setiap kali menurut pendapat salah satu dari mereka, integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanan salah satu Pihak terancam di Pasifik” dan Pasal IV, “Masing-masing Pihak mengakui bahwa serangan bersenjata di Kawasan Pasifik terhadap salah satu Pihak akan membahayakan perdamaian dan keamanannya sendiri dan menyatakan bahwa mereka akan bertindak untuk menghadapi bahaya bersama sesuai dengan proses konstitusionalnya”. Berdasarkan Pasal III, Australia dan AS memiliki mekanisme dialog preventif melalui pertemuan bilateral tingkat tinggi untuk menilai ancaman sebelum eskalasi. Sementara itu, Pasal IV merupakan respons pasca serangan yang menyatakan bahwa serangan bersenjata di kawasan Pasifik berbahaya bagi keduanya dan AS berjanji akan bertindak sesuai proses konstitusional.

AUKUS diimplementasikan dalam dua upaya yang saling terkait termasuk *submarines* (kapal selam) dan kapabilitas canggih, sebagai berikut:

1. Kapal selam, dengan para mitra AUKUS telah melaksanakan beberapa tahapan penting dalam implementasinya, sebagai berikut:
  - a. Pertukaran informasi. Pada 8 Februari 2022, *the Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement* (ENNPIA) mulai berlaku. Mendukung mitra AUKUS untuk bertukar informasi terkait propulsi nuklir angkatan laut secara trilateral.
  - b. Pengelolaan nuklir. Pada bulan Februari, tim gabungan dari mitra AUKUS mengunjungi beberapa lokasi di Australia untuk melakukan dasar pengelolaan nuklir, infrastruktur, tenaga kerja, serta kapabilitas dan persyaratan industri.
  - c. Tenaga kerja Australia. Memastikan tenaga kerja Australia memenuhi keterampilan, pelatihan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk proyek kapal selam bertenaga nuklir dengan persenjataan konvensional.
  - d. Pangkalan untuk kapal selam baru. Pada 7 Maret, PM Scott Morrison mengumumkan rencana membangun pangkalan kapal selam di pantai timur Australia.
  - e. Galangan kapal selam bertenaga nuklir. Pemerintah Australia berusaha mengamankan lahan tambahan untuk membangun galangan kapal selam bertenaga nuklir, termasuk lahan sekitar Galangan Kapal Osborne North di Australia Selatan.

- f. Non-proliferasi. Para mitra AUKUS terlibat aktif dengan *the International Atomic Energy Agency (IAEA)* untuk komitmen memastikan standar non-proliferasi dan perlindungan tertinggi terpenuhi.
2. Kapabilitas canggih. Para mitra AUKUS saling terlibat mengembangkan kapabilitas canggih, sebagai berikut:
    - a. Kapabilitas bawah laut. Melalui proyek AUKUS *Undersea Robotics Autonomous Systems (AURAS)*.
    - b. Teknologi kuantum. Melalui *the AUKUS Quantum Arrangement (AQuA)* dapat mempercepat investasi yang mendukung proyek teknologi kuantum.
    - c. *Artificial intelligence (AI)* dan *autonomy*.
    - d. Kapabilitas siber lanjutan. Upaya penguatan kapabilitas siber, termasuk dengan melindungi sistem komunikasi dan operasi penting.
    - e. Kapabilitas hipersonik dan kontra hipersonik. Bekerja sama untuk mengembangkan kapabilitas hipersonik dan kontra hipersonik.
    - f. Peperangan elektronik. Bekerja sama memahami alat, teknik, dan teknologi agar dapat beroperasi dengan lancar.
    - g. Inovasi. Mempercepat inovasi pertahanan.
    - h. Berbagi informasi. Memperluas dan mempercepat pertukaran informasi sensitif (Department of the Prime Minister and Cabinet of Australia 2022).

Khususnya pada masa PM Anthony Albanese, Australia aktif terlibat dalam AUKUS dalam proyek HMAS. Australia ikut serta dalam *Regional Presence Deployments* yang berperan penting untuk keamanan dan kemakmuran Australia dengan memperkuat kerja sama dan kemitraan dengan sekutu (Australian

Government Department of Defence 2025). AUKUS adalah contoh ketergantungan Australia yang mengorbankan pendekatan keamanan holistik berbasis maritim regional. Selaras dengan hal tersebut, ada kritik terhadap AUKUS Pilar 1 karena mengalihkan sumber daya dari prioritas sipil. Prioritas sipil yang diharapkan seperti adaptasi iklim, keamanan rantai pasokan, dan ancaman *gray zone*. AUKUS lebih fokus pada teknologi canggih dibandingkan kompleksitas *gray zone coercion* Cina seperti militerisasi laut, kapal ikan, dan *gray zone* di Laut Cina Selatan. AUKUS lebih cenderung melanjutkan dinamika historis Australia untuk mendapatkan jaminan keamanan dari AS. Meskipun keinginan Australia memperoleh jaminan keamanan dari AS tersebut berkaitan dengan geografi maritim Australia (Strating dan Wallis 2024).

Australia dan AS menandatangani “*US-Australia Framework for Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths*” pada 20 Oktober 2025 (Department of Industry Science and Resources 2025). Ada dua proyek dari proyek-proyek mineral kritis prioritas yang diumumkan pada 21 Oktober 2025, sebagai berikut:

1. Proyek pemulihan galium Alcoa-Sojitz di Wagerup, Australia Barat. Australia telah mengumumkan melakukan pendanaan ekuitas konsesional hingga \$200 juta USD. Proyek ini beragenda menyediakan hingga 10% dari total pasokan galium global. Galium adalah bahan baku penting dalam sektor pertahanan dan manufaktur semikonduktor.
2. Proyek Arafura Nolans di wilayah Utara. Australia telah mengumumkan investasi ekuitas sebesar \$100 juta USD dalam proyek ini. Proyek tersebut akan

menghasilkan 5% dari total *global rare earths* yang penting untuk keamanan energi dan pertahanan (Prime Minister of Australia 2025a).

Merujuk pada tabel 3, aliansi ANZUS dan AUKUS, maka Australia belum memiliki kemandirian militer karena belum memiliki upaya konkret untuk mencapainya. Dengan demikian, kedekatan Australia-AS dalam aliansi keamanan ANZUS dan AUKUS meningkatkan biaya eskalasi dalam sengketa tarif. Kondisi ini menurunkan kredibilitas opsi retaliasi Australia dan mendorong strategi yang lebih berhati-hati, sehingga daya tawar Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas menjadi terbatas dan kontribusi terhadap kegagalan untuk mencapai hasil yang diharapkan menjadi jelas.

### **3.2. Kerentanan Nonmiliter**

Kerentanan adalah ketika aktor yang lebih lemah dalam posisi kekuasaan, perlu menanggung biaya dari perubahan eksternal. Kerentanan fokus pada pengeluaran ketika beradaptasi dengan kendala normatif rendah dan aturan internasional yang tidak mengikat. Kerentanan non militer menempati posisi tengah dalam peringkat dominasi dan biaya. Kerentanan non militer cenderung dimanfaatkan ketika batasan normatif atau aturan internasional lemah sehingga aktor bisa memilih jalur kebijakan alternatif lain meskipun memerlukan biaya politik atau ekonomi tertentu. Implementasi kontemporer dari sumber independensi kerentanan non militer paling sering dieksploitasi ketika aturan internasional tidak dianggap mengikat sehingga aktor merasa bebas memberikan tekanan tanpa khawatir terhadap stigma normatif. Aktor memandang biaya untuk dampak reputasi dan aturan internasional

ketika ada kerentanan non militer itu relatif rendah sehingga ada keberanian untuk memaksimalkan keuntungan dari kerentanan pihak lawan seperti dengan memutuskan pasokan, membatasi akses pasar, dan lain sebagainya (Keohane dan Nye 2012).

Merujuk pada teori tersebut, untuk mengukur biaya Australia dalam mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS melalui alternatif. Maka, diuraikan menjadi 3 indikator turunan seperti, ketergantungan pasar, kemudahan substitusi pasar, dan biaya kebijakan kompensasi. Kemudian, ketiga indikator akan digunakan untuk mengukur kegagalan Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas.

Australia dan AS memiliki perjanjian perdagangan bebas berupa AUSFTA yang memberikan produk-produk Australia akses pasar AS yang lebih luas. Perjanjian ini juga meningkatkan prospek layanan, perdagangan, dan investasi Australia, bahkan meningkatkan lingkungan regulasi dan investasi antara kedua negara. Selain itu, perjanjian ini juga mempromosikan peningkatan mobilitas bisnis (Australian Government Australian Trade and Investment Commission 2025). Namun merujuk pada diagram 1, 2, 3, dan 4, maka hasil implementasi AUSFTA tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Berdasarkan diagram 1, 2, 3, dan 4, Australia mengalami defisit selama 3 tahun berturut-turut pada 2022-2024, lalu sempat surplus pada Januari-Maret 2025, dan kembali defisit pada bulan April 2025.

Merujuk pada data tabel 4, jumlah ekspor tertinggi Australia ke AS sebesar 26,77 miliar USD pada tahun 2025. Jumlah ekspor Australia ke AS 2022-2025 adalah 66,47 miliar USD. Di sisi lain, berdasarkan tabel 5 data ekspor Australia ke Cina 2022-2025 berjumlah 438 miliar USD. Jumlah Ekspor Australia ke Cina lebih besar dibandingkan ke AS. Hal tersebut membuat Cina dapat dipertimbangkan sebagai

substitusi pasar oleh Australia yang berdasarkan jumlah ekspor yang stabil dari tahun ke tahun.

**Tabel 4. Ekspor Australia ke AS**

**2022-2025**

Tahun	Ekspor ke AS (miliar USD)
2022	12,4
2023	12,6
2024	14,7
2025	26,77

**Sumber:** (Trading Economics 2026b;

CEIC Data 2025)

**Tabel 5. Ekspor Australia ke Cina**

**2022-2025**

Tahun	Ekspor ke Cina (miliar USD)
2022	102
2023	120
2024	103
2025	113

**Sumber:** (Trading Economics 2026a;

CEIC Data 2026)

Berdasarkan tabel 4, Cina termasuk mitra dagang utama Australia selain AS dengan jumlah ekspor tahunan yang stabil berdasarkan data di tabel 4. Merujuk pada tabel 4 dan 5, jumlah ekspor pada 2025 Australia dan Cina mencapai 113 miliar AUD, sedangkan Australia dan AS hanya 26,77 miliar AUD. Berdasarkan tabel 5 Cina mampu menjadi substitusi pasar bagi Australia karena memiliki jumlah ekspor yang lebih besar bila dibandingkan dengan ekspor Australia ke AS pada tabel 4. Selain ke Cina, Australia juga mendiversifikasi pasar ke Uni Eropa, Indonesia, India, Inggris, dan Timur Tengah agar tidak terlalu berketergantungan (Jose 2025).

Australia juga fokus dalam negosiasi diplomatik untuk menghadapi tarif AS 2025. Perdana Menteri Anthony Albanese, berdiplomasi dengan sabar dan tenang dengan AS. Metode diplomasi tersebut membuahkan hasil pada Agustus 2025, tarif AS kepada Australia tetap berada 10% tidak dinaikkan seperti mitra dagang AS

lainnya (Doherty 2025). Sebelumnya, Anthony Albanese tidak memberikan tarif balasan ke AS setelah diberikan tarif sebesar 10% pada April 2025. Pada saat yang sama, Anthony Albanese tidak berkompromi untuk kebijakan yang ditargetkan sebagai balasan pengecualian tarif seperti, *Pharmaceutical Benefits Scheme*, biosekuriti, atau *Media Bargaining Code*. Anthony Albanese menyatakan bahwa Australia belum siap untuk mengubah kontrol ketat biosekuriti pada daging (Needham dkk. 2025). Maka dari itu, Australia belum bebas dari tarif 25% maupun 10% yang dikenakan oleh AS karena Australia tidak mengeluarkan biaya kompensasi untuk memperoleh pengecualian. Pada 1 Agustus 2025, Australia dikenakan tarif sebesar 10% pada sebagian besar barang dari Australia yang diimpor ke AS. Akan tetapi, ada beberapa barang yang dikenakan tarif lebih tinggi, seperti tarif sebesar 50% pada impor baja dan aluminium Australia ke AS, beberapa produk tembaga dan produk yang mengandung tembaga. Lebih lanjut ada mobil, truk ringan, dan suku cadang otomotif tertentu dikenakan tarif sebesar 25%. Mulai 14 Oktober 2025, tarif 25% dikenakan pada produk kayu berlapis kain tertentu, lemari dapur, dan meja rias. Pada saat yang sama tarif 10% mulai dikenakan pada kayu lunak dan kayu olahan (Austrade 2026b).

Secara keseluruhan, Australia memiliki ketergantungan terhadap pasar AS meskipun mengalami defisit berkepanjangan berdasarkan diagram 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, berdasarkan data tabel 4 dan 5, Australia memiliki kemudahan untuk melakukan substitusi pasar ke Cina. Lebih lanjut, Australia juga memiliki rencana untuk mendiversifikasi pasar lebih luas hingga ke Uni Eropa, Indonesia, India, Inggris, dan Timur Tengah agar tidak memiliki ketergantungan hanya pada satu atau

dua mitra dagang besar saja. Namun, Australia tidak mengeluarkan biaya kebijakan kompensasi, akibatnya Australia sehingga Australia masih dikenakan berbagai macam tarif seperti yang dinyatakan sebelumnya.

Dengan demikian, respons Australia terhadap tarif AS lebih dominan berada pada tingkat kerentanan, yaitu substitusi pasar. Namun, karena langkah tersebut tidak secara signifikan mengurangi kerentanan atau mengubah struktur daya tawar terhadap AS, strategi yang ditempuh tidak cukup untuk mendorong perubahan kebijakan tarif AS, sehingga tujuan diplomasi tarif perdagangan bebas tidak tercapai.

### **3.3. Sensitivitas Nonmiliter**

Sensitivitas mengacu pada tingkat respons aktor terhadap guncangan eksternal. Sensitivitas hanya berdampak sementara terhadap aktor. Namun dampak tersebut tidak konsisten karena mudah dipengaruhi perubahan kebijakan baru. Sensitivitas non militer menduduki peringkat terendah karena kekuasaan yang dihasilkan seringkali bersifat jangka dan hanya efektif ketika adanya perubahan kebijakan sulit dilakukan karena aturan atau norma yang mengikat tetapi jika aktor yang dirugikan menanggung biaya besar. Maka aktor tersebut cenderung segera menyesuaikan atau mengubah kebijakan agar efek ketergantungan melemah dengan cepat. Implementasi kontemporer sumber independensi sensitivitas non militer adalah ketika efek jangka pendek dari perubahan kebijakan atau gangguan eksternal seperti tarif, kuota, dan kebijakan lainnya. Ketika itu aktor menekan pihak lain dengan memanfaatkan fakta bahwa pihak lain belum menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan. Namun karena diimplementasikan ketika kendala normatif tinggi berarti norma internasional

dan aturan kelembagaan kuat maka aktor cenderung memainkan sensitivitas seperti memainkan waktu, prosedur, dan penafsiran aturan (Keohane dan Nye 2012).

Merujuk pada teori tersebut, untuk mengukur seberapa cepat Australia melakukan penyesuaian terhadap tarif AS, maka akan diturunkan menjadi dua indikator yaitu strategi yang bersifat sementara dan berkelanjutan. Strategi yang bersifat sementara yang diterapkan Australia adalah *emergency trade relief* yang diupayakan oleh industri baja Australia. *Australian Steel Institute* (ASI) yang mewakili industri ini, telah mengajukan permohonan *Safeguard* kepada pemerintah federal. Permohonan tersebut berisi argumen mengenai berbagai langkah bantuan perdagangan darurat untuk mengatasi krisis penetrasi impor yang mengubah peta persaingan bagi para fabrikator baja Australia (Australian Steel Institute 2025).

Sementara itu, salah satu strategi berkelanjutan Australia adalah diversifikasi pasar seperti melalui program *Export Market Development Grants* (EMDG). Strategi ini fokus untuk mengurangi ketergantungan ekstrem pada satu atau dua mitra dagang, dengan memperluas jangkauan pasar. Program EMDG membantu usaha kecil dan menengah Australia untuk melakukan ekspor. Australia memberikan hibah untuk mendukung pemasaran dan promosi yang meningkatkan ekspor serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi Australia (Austrade 2026a). Program EMDG pada periode 2024-2025, berkontribusi pada pencapaian 2,015 kesepakatan ekspor dengan nilai awal 7 miliar AUD dan pencapaian 899 transaksi perdagangan ke Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan nilai awal 2,3 miliar AUD (Austrade 2025b). Selain EMDG, ada *Accessing New Markets Initiative* (ANMI). Australia meluncurkan ANMI pada 15 September 2025, sebagai respons terhadap peningkatan ketidakpastian ekonomi.

ANMI merupakan program intensif selama 2 tahun yang bertujuan untuk membantu eksportir Australia, untuk mencari dan memasuki pasar ekspor baru, dan mengembangkan peluang di pasar yang sudah ada (Austrade 2025a). Pendanaan ANMI mendorong perluasan program dengan delegasi yang lebih besar, pencocokan bisnis tambahan, dan pengalaman yang lebih baik di berbagai acara penting termasuk *ASIA Fruit Logistica*, *Quantum World Congress*, *Perumi*, *China International Import Expo*, dan *Gulfood* (Trading Economics 2026b).

Ketiga rencana strategi tersebut, memang dibagi menjadi 2 macam yaitu rencana strategi berkelanjutan dan sementara. Akan tetapi, mengamati prosedur penerapan ketiga rencana strategi tersebut, ketiganya lebih mengelola dampak jangka pendek dari tarif AS. Program ANMI sebagai contohnya, yang mana program ini merupakan program intensif 2 tahun dari Austrade yang membantu eksportir memasuki pasar baru, bukan merestruktur ulang industri Australia yang berketergantungan pada pasar AS. Akibatnya, program tersebut hanya mampu mengelola sebagian dampak tarif AS.

Dengan demikian, respons Australia terhadap tarif AS lebih dominan berada pada tingkat sensitivitas, yaitu penyesuaian dalam kerangka kebijakan yang ada untuk mengelola dampak jangka pendek. Namun karena langkah tersebut tidak secara signifikan mengurangi kerentanan atau mengubah struktur daya tawar terhadap AS, strategi yang ditempuh tidak cukup untuk mendorong perubahan kebijakan tarif AS, sehingga tujuan diplomasi tarif tidak tercapai.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Dalam rangka menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran berdasarkan konsep *asymmetrical interdependence* dari Keohane dan Nye. Dengan demikian, kesimpulan hasil analisis determinan kegagalan Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS di era Anthony Albanese berdasarkan tiga sumber independensi dalam konsep *asymmetrical interdependence* dari Keohane dan Nye yaitu, militer, kerentanan non militer, dan sensitivitas non militer. Pertama, dalam kemandirian militer Australia belum memiliki kemandirian militer berdasarkan data pengeluaran untuk pertahanan dan kedekatan Australia-AS melalui ANZUS dan AUKUS. Kedua, kerentanan non militer diuraikan menjadi 3 indikator turunan digunakan untuk mengukur biaya Australia dalam mengurangi ketergantungan melalui alternatif seperti, ketergantungan pasar, kemudahan substitusi pasar, dan biaya kebijakan kompensasi. Ketiga indikator tersebut, mendukung bahwa respons Australia terhadap tarif AS lebih dominan berada pada tingkat kerentanan, yaitu substitusi pasar tetapi tidak secara signifikan mengubah struktur daya tawar Australia terhadap AS. Ketiga, untuk mengukur seberapa cepat Australia melakukan penyesuaian terhadap tarif AS, maka akan diturunkan menjadi dua indikator yaitu strategi yang bersifat sementara dan berkelanjutan. Berdasarkan kedua macam strategi tersebut, respons Australia terhadap tarif AS lebih dominan berada pada

tingkat sensitivitas, yaitu penyesuaian dalam kerangka kebijakan yang ada untuk mengelola dampak jangka pendek tetapi strategi yang ditempuh tidak cukup untuk mendorong perubahan kebijakan tarif AS. Dengan demikian, Australia gagal dalam diplomasi tarif perdagangan bebas karena tidak memenuhi ketiga sumber kemandirian dalam *asymmetrical interdependence* dari Keohane dan Nye. Berdasarkan ini, Australia tidak memiliki dominasi maupun daya tawar terhadap AS, oleh karena itu Australia tidak mampu mendorong perubahan kebijakan tarif AS melalui diplomasi tarif perdagangan bebas.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini telah membahas determinan kegagalan Australia dalam diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS 2022-2025 pada masa Anthony Albanese. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran berdasarkan konsep *asymmetrical interdependence* dari Keohane dan Nye. Peneliti menemukan bahwa determinan kegagalan Australia di era Anthony Albanese dalam diplomasi tarif perdagangan bebas dengan AS adalah interdependensi asimetri Australia terhadap AS. Sebagaimana dari hasil analisis berdasarkan 3 sumber independensi menurut konsep *asymmetrical interdependence* dari Keohane dan Nye yaitu militer, kerentanan non militer, dan sensitivitas non militer, Australia gagal karena belum memiliki kemandirian militer, alternatif dalam mengurangi ketergantungan, dan rencana strategi yang sesuai untuk mendorong perubahan kebijakan tarif AS terhadap Australia.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti dengan konsep berbeda untuk memperoleh perspektif baru. Disarankan untuk meneliti periode selanjutnya terkait diplomasi tarif perdagangan bebas Australia dengan membandingkan periode-periode kepemimpinan sebelumnya yang menghadapi tarif AS. Maka dari itu, menarik meneliti interaksi di periode ke-2 kepemimpinan PM Anthony Albanese.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABC News*. 2025. "Inflation in Australia Is 'yesterday's Problem' after Trump's Tariffs." April 3. <https://www.abc.net.au/news/2025-04-04/trump-tariffs-impact-economy-inflation-yesterdays-problem/105131364>.
- Albanese, Anthony, Donald Trump, dan Rishi Sunak. 2023. "Joint Leaders Statement On AUKUS | Prime Minister of Australia." Maret 13. <https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aukus>.
- Aratani, Lauren. 2024. "Trump Vows to Impose Tariffs as Experts Warn of Price Hikes and Angry Allies." US News. *The Guardian*, Oktober 15. <https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/15/trump-tariffs-price-hikes-warnings>.
- Austrade. 2025a. "\$50 million to help Australian exporters access new export markets | News and updates." September 17. <https://export.business.gov.au/news-and-events/news-and-updates/50-million-to-help-australian-exporters-access-new-export-markets>.
- Austrade. 2025b. "Annual report | Austrade." <https://www.austrade.gov.au/en/about-austrade/governance/annual-report>.
- Austrade. 2026a. "About the Export Market Development Grant (EMDG) program | Austrade." <https://www.austrade.gov.au/en/how-we-can-help-you/grants/export-market-development-grants/about>.
- Austrade. 2026b. "US tariff rates and exemptions | Tariffs, taxes and duties." <https://export.business.gov.au/pricing-costs-and-finance/tariffs-taxes-and-duties/us-tariff-rates-and-exemptions>.
- Australian Bureau of Statistics. 2025a. "Australia's Trade with the United States of America | Australian Bureau of Statistics." Mei 6. <https://www.abs.gov.au/articles/australias-trade-united-states-america>.
- Australian Bureau of Statistics. 2025b. "International Trade: Supplementary Information, Financial Year, 2024-25 Financial Year | Australian Bureau of Statistics." Desember 17. <https://www.abs.gov.au/statistics/economy/international-trade/international-trade-supplementary-information-financial-year/latest-release>.
- Australian Government Australian Trade and Investment Commission. 2025. "Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA) | Austrade." <https://www.austrade.gov.au/en/how-we-can-help-you/australian-exporters/free-trade-agreements/united-states>.

- Australian Government Department of Defence. 2025. "HMAS Ballarat returns after successful Regional Presence Deployment." Website. Defence, Desember 4. <https://www.defence.gov.au/news-events/releases/2025-12-04/hmas-ballarat-returns-after-successful-regional-presence-deployment>.
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. 2024. "Australia-United States FTA | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade." <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/ausfta/australia-united-states-fta>.
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. 2025a. "Latest on US Tariffs | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade." <https://www.dfat.gov.au/trade/trade-and-investment/latest-us-tariffs>.
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. 2025b. "United States of America Country Brief | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade." <https://www.dfat.gov.au/geo/united-states-of-america/united-states-of-america-country-brief>.
- Australian Government Export Finance Australia. 2025. "Australia—US Tariffs Take Effect, Diversified Exports Insulate Economy." Maret. <https://www.exportfinance.gov.au/resources/world-risk-developments/2025/march/australia-us-tariffs-take-effect-diversified-exports-insulate-economy/>.
- Australian Steel Institute. 2025. "Australian Steel Institute - Emergency Govt Measures Sought in the Wake of a Surge in Low-Priced Imported Steelwork." November 27. <https://www.steel.org.au/news-and-events/media-releases/emergency-govt-measures-sought-in-the-wake-of-a-surge-in-low-priced-imported-steelwork/>.
- Barret, Tom. 2025. "AUSFTA at 20: The Past, Present and Future of the US—Australia Trade and Investment Relationship." <https://www.ussc.edu.au/ausfta-at-20-the-past-present-and-future-of-the-us-australia-trade-and-investment-relationship>.
- Barrett, Jonathan. 2025. "Australia and the US Have Signed a Critical Minerals Deal to Take on China's Monopoly. Here's What You Need to Know." Australia News. *The Guardian*, Oktober 21. <https://www.theguardian.com/world/2025/oct/21/australia-us-critical-minerals-rare-earths-deal-china-explainer>.
- Belot, Henry. 2025. "Australia Will Not Revise Critical Minerals-for-Tariffs Exemption Deal Rejected by Trump Administration." Australia News. *The Guardian*, Maret 15. <https://www.theguardian.com/australia->

news/2025/mar/15/australia-will-not-revise-critical-minerals-for-tariffs-exemption-deal-rejected-by-trump-administration.

CEIC Data. 2025. “Australia | Total Ekspor ke Amerika Serikat | 1988 – 2026 | Indikator Ekonomi | CEIC.”  
<https://www.ceicdata.com/id/indicator/australia/total-exports-to-usa>.

CEIC Data. 2026. “Australia Total Exports to China, 1969 – 2026 | CEIC Data.”  
<https://www.ceicdata.com/en/indicator/australia/total-exports-to-china>.

Chandra, Dr Monalisa, Garima Singh, Rimjhim Rana Singh, Prof Alok Verma, dan Vani Dhaka. 2025. “Impact of U.S. Tariffs on International Trade: Legal Perspectives and Global Implications.” *International Journal of Environmental Sciences* 11 (5s): 614–20.  
<https://doi.org/10.64252/vrwdxq67>.

Channer, Hayley. 2024. “Biden or Trump US Trade Isolationism a Concern in Canberra.” Mei 3. <https://www.ussc.edu.au/biden-or-trump-us-trade-isolationism-a-concern-in-canberra>.

Clarke, Michael. 2025. “Set Adrift: The Australian Political Class and the US Alliance under Trump 2.0.” Maret 7. <https://thediplomat.com/2025/03/set-adrift-the-australian-political-class-and-the-us-alliance-under-trump-2-0/>.

Deane, Felicity. 2025. “US tariffs will upend global trade. This is how Australia can respond.” *The Conversation*, April 3. <http://theconversation.com/us-tariffs-will-upend-global-trade-this-is-how-australia-can-respond-253621>.

Dell’Era, Alice, dan Félix E. Martin. 2024. “Constructing Like-Mindedness: Australia’s Contribution to the ANZUS Alliance through Narra.” *Air University (AU)*, September 10.  
<https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/3900077/constructing-like-mindedness-australias-contribution-to-the-anzus-alliance-thro/>.

Department of Industry Science and Resources. 2025. “Australia and the United States Sign Landmark Bilateral Framework on Critical Minerals | Department of Industry Science and Resources.” News.  
<https://www.industry.gov.au/node/95311>, Oktober 21.  
<https://www.industry.gov.au/news/australia-and-united-states-sign-landmark-bilateral-framework-critical-minerals>.

Department of the Prime Minister and Cabinet of Australia. 2022. *Factsheet: Implementation of the Australia – United Kingdom – United States Partnership (AUKUS)*. April 5.  
<https://pmtranscripts.pmc.gov.au/sites/default/files/AUKUS-factsheet.pdf>.

- Doherty, Ben. 2025. "Australia Dodges Latest Trump Tariff Hikes as Trade Minister Heralds 'Vindication' for Albanese's Approach." Australia News. *The Guardian*, Agustus 1. <https://www.theguardian.com/australia-news/2025/aug/01/australia-imports-us-trump-tariffs>.
- Doherty, Ben, dan Josh Butler. 2025. "Anthony Albanese Denounces US Tariffs as 'Not a Friendly Act' after Donald Trump Refuses Exemption for Australia." Business. *The Guardian*, Maret 12. <https://www.theguardian.com/business/2025/mar/12/us-rules-out-tariff-exemption-for-australia-after-trump-considered-it-and-considered-against-it>.
- Edel, Charles. 2023. *The United States, Britain, and Australia Announce the Path Forward for AUKUS*. Maret 16. <https://www.csis.org/analysis/united-states-britain-and-australia-announce-path-forward-aucus>.
- Evans, Jake. 2025. "Albanese Won't Budge on Key US Grievances, as Trump's 'liberation Day' Looms." *ABC News*, April 1. <https://www.abc.net.au/news/2025-04-01/election-2025-albanese-tariff-trump-biosecurity-exemption/105121156>.
- Fallon, Stephen. 2022. "Australia's Security Relationships." Text. Commonwealth of Australia, Juni. Australia. [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_departments/Parliamentary\\_Library/Research/Briefing\\_Book/47th\\_Parliament/AustraliaSecurityRelationships](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/Research/Briefing_Book/47th_Parliament/AustraliaSecurityRelationships).
- Feigenbaum, Evan A. 2025. "Beneath the Mateship, a Quiet Crisis Is Brewing in the U.S.-Australia Alliance | Carnegie Endowment for International Peace." <https://carnegieendowment.org/posts/2025/06/us-australia-alliance-quiet-crisis?lang=en>.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiya, dkk. 2022. "Metodologi Penelitian Kualitatif." ResearchGate, Maret. [https://www.researchgate.net/publication/359652702\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif).
- IISS. 2026. "The Military Balance 2026: Global Defence Spending." IISS. <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/2026/the-military-balance-2026/global-defence-spending/>.
- Jervis-Bardy, Dan, dan Josh Butler. 2025. "Trump's Tariffs Are an Unprecedented Hostility from an Ally – but Could Albanese Shape Them in His Favour?" Australia News. *The Guardian*, April 3. <https://www.theguardian.com/australia-news/2025/apr/03/trump-tariffs-hostility-ally-australia-pm-anthony-albanese>.

- Jose, Renju. 2025. "Australia Turns down China's Offer to 'join Hands' to Fight US Tariffs." Business. *Reuters*, April 10.  
<https://www.reuters.com/business/australia-turns-down-chinas-offer-join-hands-fight-us-tariffs-2025-04-10/>.
- Keohane, Robert O., dan Joseph S. Nye. 2012. *Power and Interdependence*. 4. ed. Longman Classics in Political Science. Pearson.
- Kim, Victoria. 2025. "Faced With a Changed Ally, Australia Debates the Need for a 'Plan B.'" World. *The New York Times*, April 4.  
<https://www.nytimes.com/2025/04/04/world/australia/us-trump-security-alliance.html>.
- Lyons, Kate. 2025. "Albanese 'Confident' US Would Come to Australia's Defence in Event of Attack." Australia News. *The Guardian*, Februari 24.  
<https://www.theguardian.com/australia-news/2025/feb/24/albanese-confident-us-would-come-to-australias-defence-in-event-of-attack>.
- Muroi, Millie, dan Shane Wright. 2025. "Chalmers' grim warning about Trump's escalating trade war." The Sydney Morning Herald, Maret 17.  
<https://www.smh.com.au/politics/federal/chalmers-grim-warning-about-trump-s-escalating-trade-war-20250317-p5lk5w.html>.
- National Museum of Australia. 2024. "National Museum of Australia - ANZUS Treaty." National Museum of Australia; c=AU; o=Commonwealth of Australia; ou=National Museum of Australia, September 18.  
<https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/anzus-treaty>.
- Needham, Kirsty, Alasdair Pal, dan Alasdair Pal. 2025. "Australia to 'stand up for National Interests' on US Tariffs, Says PM Albanese." World. *Reuters*, April 3. <https://www.reuters.com/world/australia-stand-up-national-interests-us-tariffs-says-pm-albanese-2025-04-02/>.
- Nisar, Rana Danish, dan Tariq Rahim. 2025. "From Make America Great Again to Make America Alone: Understanding Trump 2.0 World's Mathematics." *Qlantic Journal of Social Sciences* 6 (2): 1–18.  
<https://doi.org/10.55737/qjss.vi-ii.25331>.
- Norman, Jane. 2018. "Trump, Turnbull Hit on Deal to Exclude Australia from New US Tariffs." *ABC News*, Maret 10. <https://www.abc.net.au/news/2018-03-10/malcolm-turnbull-donald-trump-working-tariff-exemption-agreement/9534984>.
- Parliament of Australia. 1997. *Appendix B: The ANZUS Treaty*.  
[https://www.aph.gov.au/~media/wopapub/house/committee/jfadt/usrelations/report/appendixb\\_pdf.ashx](https://www.aph.gov.au/~media/wopapub/house/committee/jfadt/usrelations/report/appendixb_pdf.ashx).

- Parliamentary Education Office. 2023. "ANZUS Treaty - Parliamentary Education Office." <https://peo.gov.au/understand-our-parliament/history-of-parliament/history-milestones/australian-parliament-history-timeline>.
- Pham, Dr Cong. 2025. "The Economic Impact of Trump's Tariffs on Australia." *The Economic Impact of Trump's Tariffs on Australia*, Mei 15. <https://this.deakin.edu.au/society/the-economic-impact-of-trumps-tariffs-on-australia/>.
- Prime Minister of Australia. 2025a. "Historic Critical Minerals Framework Signed by President Trump and Prime Minister Albanese | Prime Minister of Australia." Oktober 20. <https://www.pm.gov.au/media/historic-critical-minerals-framework-signed-president-trump-and-prime-minister-albanese>.
- Prime Minister of Australia. 2025b. "Statement on United States Tariffs | Prime Minister of Australia." Maret 12. <https://www.pm.gov.au/media/statement-united-states-tariffs>.
- Ranald, Dr Patricia. 2025. "Future US-Australia Trade Relations Demand a Broad, Principled Response from Government." *Australian Institute of International Affairs*, Mei 28. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/future-us-australia-trade-relations-demand-a-broad-principled-response-from-government/>.
- SIPRI. 2025. "SIPRI Milex." <https://milex.sipri.org/sipri>.
- Staszewska, Ewa. 2025. "'Very Fine Man': Trump's Praise for Albanese as He Considers Australian Tariff Exemptions." SBS News, Februari 11. <https://www.sbs.com.au/news/article/very-fine-man-trumps-praise-for-albanese-as-he-considers-australian-tariff-exemptions/3xklmo9m2>.
- Strating, Rebecca, dan Joanne Wallis. 2024. *Girt by Sea: Re-Imagining Australia's Security*. La Trobe University Press.
- Stuart, Riley, dan Carrington Clarke. 2025. "Trump Aide Says Australia 'killing Aluminium Market' as US Tariffs Loom." *ABC News*, Februari 11. <https://www.abc.net.au/news/2025-02-12/trump-aide-says-australia-killing-aluminium-market/104925742>.
- Syawaludin, Dwi Febri, dan Mega Mustika Sari. 2025. "Dampak Kebijakan Tarif AS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Global Pada 2025." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3 (3): 277–84. <https://doi.org/10.57096/lentera.v3i3.162>.
- The Independent. 2025. "Trump Tariffs in Full: Every Country Hit and the Surprising Exemptions." April 9.

<https://www.independent.co.uk/news/world/americas/trump-tariffs-countries-list-china-uk-canada-russia-b2729975.html>.

The United States Studies Centre. 2025. "Chapter 9: The Evolution of the Alliance." <https://www.ussc.edu.au/books/the-alliance-at-70/chapter-9-the-evolution-of-the-alliance>.

The White House. 2022. "FACT SHEET: Implementation of the Australia – United Kingdom – United States Partnership (AUKUS)." *The White House*, April 5. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/05/fact-sheet-implementation-of-the-australia-united-kingdom-united-states-partnership-aucus/>.

The White House. 2023. "Australia-United States Joint Leaders' Statement - An Alliance for Our Times." *The White House*, Mei 20. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/australia-united-states-joint-leaders-statement-an-alliance-for-our-times/>.

Thrower, Jack. 2025. "AUSFTA: A Bad Deal Then. Even Worse Now." The Australia Institute, Maret 18. <https://australiainstitute.org.au/post/ausfta-a-bad-deal-then-even-worse-now/>.

Ticha, Victoria. 2025. "How US Tariffs Impact Australia and What Policymakers Can Do." UNSW Sites, Maret 12. <https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2025/03/how-us-tariffs-impact-australia-and-what-policymakers-can-do>.

Trading Economics. 2026a. "Australia Exports to China - 2026 Data 2027 Forecast 1988-2024 Historical." <https://tradingeconomics.com/australia/exports/china>.

Trading Economics. 2026b. "Australia Exports to United States - 2026 Data 2027 Forecast 1988-2024 Historical." <https://tradingeconomics.com/australia/exports/united-states>.

U. S. Embassy. 2022. "U.S.-Australia Relations." *U.S. Embassy & Consulates in Australia*, November 16. <https://au.usembassy.gov/u-s-australia-relations/>.

UN Trade and Development. 2025. *Global Trade Update (April 2025) Escalating tariffs: the impact on small and vulnerable economies*. April. <https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2025d3.pdf>.

United States Department of State. 2017. "AUSMIN 2017 Fact Sheet on the U.S. - Australia Relationship." *United States Department of State*, Juni 4. <https://2017-2021.state.gov/ausmin-2017-fact-sheet-on-the-u-s-australia-relationship/>.

Verrender, Ian. 2025. "How America Ripped off Australia with 'Free Trade.'" *ABC News*, Maret 16. <https://www.abc.net.au/news/2025-03-16/verrender-us-free-trade-analysis/105053766>.

Vincent, Brandi. 2025. "Trump Officially Endorses AUKUS at White House Meeting with Australian Prime Minister." *DefenseScoop*, Oktober 20. <https://defensescoop.com/2025/10/20/trump-officially-endorses-aukus-at-white-house-meeting-with-australian-prime-minister/>.

Walters, Patrick, Robert Clark, Peter Jennings, dkk. 2021. "ANZUS at 70: The past, present and future of the alliance - ASPI." Agustus 18. <https://www.aspi.org.au/report/anzus-70-past-present-and-future-alliance/>.

Watson, Katy, dan Yang Tian. 2025. "Trump Tariffs: Anger as Australia Hit with 10% Tax on Exports." April 3. <https://www.bbc.com/news/articles/c705z2e8wxzo>.

Wilkins, Thomas. 2019. "Re-assessing Australia's Intra-alliance Bargaining Power in the Age of Trump." *Security Challenges* 15 (1): 9–32.